

*Strategi Komunitas Resan dalam Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di
Gunungkidul*



Oleh:

Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain

NIM: 23202031004

TESIS

Diajukan kepada Program Magister Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Sosial

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-583/Un.02/DD/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : Strategi Komunitas Resan dalam Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Gunungkidul

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIRUL WAHID RIDLO WICAKSONO ZAIN, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23202031004
Telah diujikan pada : Senin, 21 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6826dd68883b5



Penguji II
Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6823e201b26d7



Penguji III
Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos.,
M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68245e04adecc



Yogyakarta, 21 April 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 682e74c80ef5c

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain

NIM : 23202031004

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

a yang menyatakan,



Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain
NIM: 23202031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain
NIM : 23202031004
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2024



Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain
NIM: 23202031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth. Prof. Dr. Sriharini, S.Ag., M.Si.
Ketua Program Studi Magister
Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Strategi Komunitas Resan dalam Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Gunungkidul

Oleh

Nama : Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain
NIM : 23202031004
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.

MOTTO

“Sangkan Paraning Dumadi” (Thoha 2005)

Wujud introspeksi berkaitan dengan perenungan diri perihal dari mana manusia berasal, apa dan siapa manusia, serta ke mana arah hidup yang dituju



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Ayah, Ibu, dan Adik saya tercinta
serta kepada almamater kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK

Perubahan iklim dan pembangunan telaga telah menyebabkan kerusakan ekologis telaga di Kabupaten Gunungkidul, sementara masyarakat masih bergantung pada kearifan lingkungan sebagai sumberdaya aktivitas ekonomi. Telaga sebagai penyedia sumber air merupakan entitas lingkungan paling signifikan bagi masyarakat tradisional Gunungkidul yang hidup di kawasan minim air (karst) untuk menunjang perekonomian masyarakat khususnya pada pengembangan perikanan, pertanian, dan peternakan. Merespon kondisi tersebut, Komunitas Resan sebagai wadah perkumpulan masyarakat lokal di Gunungkidul melakukan giat sosial-ekologis sebagai wujud penguatan adaptasi lokal terhadap perubahan iklim dan fungsi lingkungan yang terjadi. Studi ini selanjutnya berfokus pada bagaimana strategi Resan dalam konservasi lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dan menganalisisnya dalam perspektif etika lingkungan untuk mengkonfigurasi bentuk gerakan lokal. Penelitian ini ditempuh dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan secara beriringan melakukan investigasi melalui observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi di Padukuhan Dondong yang menginisiasi revitalisasi Telaga Dondong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan strategi Komunitas Resan dalam konservasi lingkungan berbasis masyarakat terbentuk melalui integrasi dan penyorotan secara tradisional terhadap masyarakat dan kearifan lokalnya yang telah tumbuh di Padukuhan Dondong. Strategi ini berbentuk penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan untuk merekonstruksi posisi masyarakat dalam pembangunan dari objek menuju subjek pembangunan. Pengkapasitasan dilakukan sebagai sarana edukasi masyarakat berbasis wedangan yang cair dan santai tentang upaya konservasi lingkungan. Adapun pendayaan dilakukan dengan memberikan otoritas dan daya sebesar-besarnya terhadap masyarakat. Sementara itu pada prosesnya, upaya konservasi ini menunjukkan adanya perpaduan pendekatan yang dilakukan oleh Komunitas Resan berdasarkan kajian etika lingkungan. Keduanya adalah pendekatan ekosentris dan pendekatan *human ecology welfare*.

Kata Kunci: Perubahan Iklim dan Pembangunan Telaga, masyarakat tradisional, Komunitas Resan, Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Climate change and lake establishment have caused ecological damage to the lake in Gunungkidul Regency, while the community still relies on environmental wisdom as a resource for economic activities. The lake as a water source provider is the most significant environmental entity for traditional Gunungkidul communities living in water-scarce areas (karst) to support the community's economy, especially in the development of fisheries, agriculture, and livestock. Responding to these conditions, the Resan Community as a forum for local community associations in Gunungkidul conducts social-ecological activities as a form of strengthening local adaptation to climate change and environmental functions that occur. This study then focus on how Resan's strategy in community-based conservation in Gunungkidul Regency and analyze it from the perspective of environmental ethics to configure the form of local movements. This research is pursued with a descriptive qualitative approach by simultaneously conducting investigations through participant observation, semi-structured interviews, and documentation in Padukuhan Dondong which initiated the revitalization of Lake Dondong. The results showed that the Resan Community's strategic ideas in community-based environmental conservation were formed through traditional integration and highlighting of the community and its local wisdom that has grown in Padukuhan Dondong. This strategy takes the form of awareness, capacity building, and empowerment. Awareness raising is done to reconstruct the community's position in development from object to subject. Capacity building is carried out as a means of educating the community based on a fluid and relaxed wedangan about environmental conservation efforts. Meanwhile, empowerment is carried out by giving as much authority and power as possible to the community. Meanwhile, in the process, this conservation effort shows a combination of approaches taken by the Resan Community based on environmental ethics studies. Both are the anthropocentric approach and the human ecology welfare approach.

Keywords: Climate Change and Lake Establishment, Traditional Communities, Resan Community, Community Based Conservation

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Suatu saat ketika sore hari menjelang maghrib, saya menonton suatu video di kanal Youtube Bagus Muljadi yang menyajikan presentasinya di hadapan ratusan peserta seminar kebangsaan di suatu universitas. Kata-katanya sederhana namun cukup menusuk, bahwa *Indonesia itu adalah laboratorium dunia yang membuatnya bukan hanya punya landasan untuk merawat lingkungan hidup bumi, tapi landasan moral juga dari kebudayaan*. Pada pernyataannya tersebut, Bagus sebagai seorang ilmuwan dan orang Indonesia, mengajak seluruh mahasiswa yang hadir pada forum tersebut untuk turut berkontribusi dalam mengungkap pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di sekitar lalu menganalisisnya untuk menemukan kebijaksanaan di dalamnya. Lebih khusus ia mengatakan, *dari mana kita mau tahu tentang antroposen ilmu-ilmu bumi yang menjadi landasan orang Yogyakarta untuk melaksanakan ritualnya? Di Inggris, batunya ada di Scotland*.

Menyaksikan Dr. Bagus berbicara, saya teringat dengan keterangan Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan pada suatu momen kuliah tentang fenomena *epistemic injustice* yang sedang melanda negeri ini. Di mana orang-orang sekarang lebih bangga ketika memperoleh pengetahuan-pengetahuan dari luar atau Barat, sedangkan mengabaikan pengetahuan lokal minimal untuk urusan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sama seperti kedua tokoh tersebut, saya pun merasakan kegelisahan yang sama. Dalam rumpun ilmu pengembangan masyarakat, pengetahuan lokal termasuk sebagai aset berharga untuk mengembangkan masyarakat mencapai kesejahteraan. Saya pun lantas tertarik untuk menjadikan topik pengetahuan lokal untuk kearifan lingkungan sebagai tema riset tesis saya sebagaimana tertera dalam naskah ini.

Gayung bersambut, di saat yang lain ketika sedang asyik mengeksplorasi *browser*, saya menemukan sebuah *website* bernama Komunitas Resan yang sedang akan mengadakan acara bertajuk Revitalisasi Telaga Dondong Berbasis Kearifan Lokal. Jelas saya girang bukan main.

Saya langsung menghubungi e-mail yang tertera untuk memohon rekomendasi kehadiran pada acara tersebut. Syukur alhamdulillah, admin mengafirmasi permohonan saya dan akhirnya saya bertemu dengan orang-orang hebat produk asli Gunungkidul. Mereka adalah orang-orang lokal yang memiliki kepedulian terhadap nasib sesamanya dan nasib lingkungan hidup yang mulai banyak berubah setelah terjadinya perubahan iklim. Banyak sekali pelajaran, moralitas kehidupan, dan pengalaman berharga selama proses penelitian. Bagaimana sebuah upaya pengembangan masyarakat dan konservasi lingkungan terintegrasi dalam satu gerakan lalu menciptakan harmoni gerakan akar rumput yang terus menerus menebar kebaikan dari pengetahuan lokal yang bersifat organik dan otentik.

Tentu saya banyak berhutang budi dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini, terutama kepada Dosen Pembimbing Tesis, yakni Prof. Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si. Terimakasih yang amat mendalam saya haturkan kepada beliau, sebab telah memberikan kesempatan dan waktu yang amat berharga untuk mengarahkan dan membimbing saya sehingga tesis ini dapat terfokus dan holistik. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh dosen dan sivitas akademika program studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah membimbing kami selama proses studi. Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd., Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA., Dr. Abdur Rozaki, M.Si., Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si., Siti Syamsiatun, Ph.D, Suharto, Ph.D, Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si. Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D. dan tidak lupa sekretaris prodi Bapak Ahmad Izzudin, M.Ag. terimakasih kami haturkan, jasa dan pengabdian *panjenengan sedoyo* tidak akan pernah kami lupakan.

Terimakasih pula kepada teman-teman Prodi Magister PMI *al-homsatul awwalun*, Elfira Zidna Almaghfiro, Isnı Radifa Ramli, Mushonnif, dan Vina Fellinda Alfiatun Maghfiro. Teman-teman seperjuangan yang selalu kebersamai baik suka maupun duka, memberikan dorongan kepada untuk tetap waras dan fokus pada tujuan utama studi, serta dukungan dalam

bentuk apapun selama dua tahun masa studi di Magister PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga kepada seluruh narasumber, Komunitas Resan dan segenap Masyarakat Padukuhan Dondong, yang telah merelakan waktu, tempat, dan informasinya kepada peneliti dalam mendukung penyusunan tesis ini.

Tidak lupa terimakasih yang paling tulus dan mendalam, kepada Bapak H. Kodrat Riyanto, SH., M.Pdi. dan Ibu Hj. Fitrotul Himmah SH. yang telah setia menemani dan membantu saya untuk menyelesaikan studi ini. Kedua orang tua saya ini tidak pernah lupa menyampaikan kasih sayangnya meski tak menggunakan kata-kata, namun selalu tepat menyasar ke ulu hati terdalam. Keduanya selalu menjadi semangat bagi saya untuk terus berbuat baik dan menebar kemanfaatan seluas-luasnya, yang salah satunya diharapkan dapat dipetik dari naskah tesis ini. Terakhir untuk adikku tersayang, Nur Humairoh Fathonah Q. Z, yang selalu menemani saya dalam setiap perjalanan hidup. Semoga dengan selesainya tesis ini, dapat memberikan kontribusi bagi teman-teman yang juga sedang memperjuangkan perubahan.



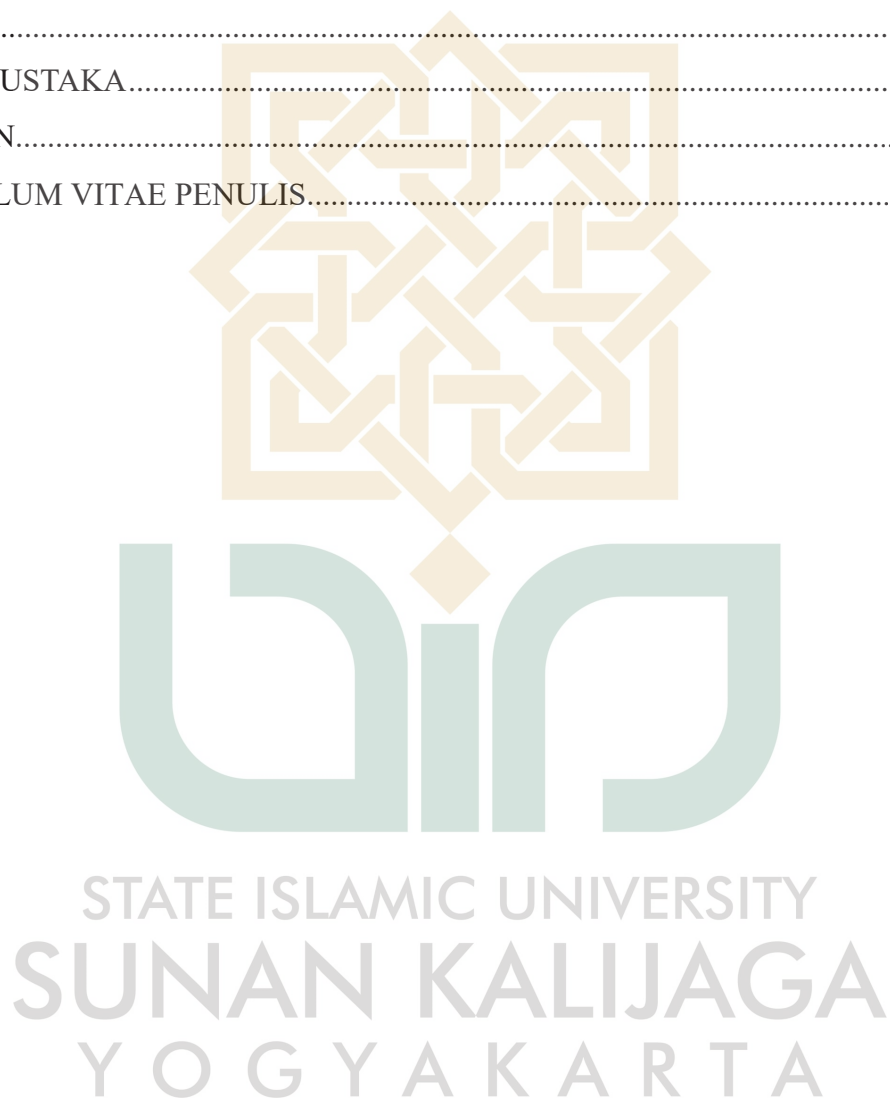
Hormat Saya

Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	27
1. Pengembangan Masyarakat dalam Konservasi atau Community Based Conservation.....	28
2. Green Social Ethic atau Etika Lingkungan.....	33
F. Metode Penelitian	39
1. Teknik Pengumpulan Data.....	41
2. Lokasi Penelitian.....	44
3. Analisis Data.....	45
G. Sistematika Pembahasan.....	46
BAB II.....	48
LINGKUNGAN, MASYARAKAT LOKAL, DAN KOMUNITAS RESAN	48
A. Kondisi Lingkungan dan Ekosistem Telaga terhadap Demografi Masyarakat di Gunungkidul.....	48
B. Konstruksi Sosial Budaya Masyarakat Gunungkidul	57
C. Komunitas Resan	68
BAB III	77
STRATEGI KOMUNITAS RESAN DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT DI GUNUNGKIDUL	77
A. Penyadaran (Dari Objek Pembangunan Menuju Subjek Pembangunan)	77
B. Pengkapasitasan: Edukasi Konservasi Lingkungan Berbasis Wedangan	91
C. Pendayaan: Kampanye Konservasi Lingkungan di Media Sosial	108

BAB IV	117
TIPE ETIKA LINGKUNGAN DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT DI GUNUNGKIDUL	117
A. Konstruksi Ideologis Etika Lingkungan pada Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Gunungkidul	117
B. Tipe Etika Lingkungan pada Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Gunungkidul.....	126
BAB V	134
PENUTUP.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	144
CURRICULUM VITAE PENULIS.....	144



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Profil Narasumber.....	43
---------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul.....	48
Gambar 2	Ilustrasi Dataran Karst	49
Gambar 3	Struktur tanah dataran karst	50
Gambar 4	Tradisi wedangan masyarakat Padukuhan Dondong	63
Gambar 5	Tradisi wedangan masyarakat Padukuhan Dondong	63
Gambar 6	Agenda Merti Telaga Dondong.....	87
Gambar 7	Poster Kegiatan	94
Gambar 8	Upacara Bendera.....	94
Gambar 9	Pertunjukan Seni Masyarakat Padukuhan Dondong	95
Gambar 10	Proses Pelaksanaan Diskusi	97
Gambar 11	Kudapan	97
Gambar 12	Ilustrasi tanaman penyangga ekosistem telaga	102
Gambar 13	Telaga Balong	103
Gambar 14	Telaga Dondong.....	103
Gambar 15	Contoh lapisan lemi dan tanah liat.....	105
Gambar 16	Proses Perataan Lemi	115
Gambar 17	Giat Penanaman Ring Penyangga Telaga	115
Gambar 18	Kegiatan Ngedrek di Telaga Dondong	116
Gambar 19	Kegiatan Ngedrek di Telaga Dondong.....	116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim dan pembangunan telaga telah berdampak pada kerusakan ekologis telaga di Kabupaten Gunungkidul, sementara masyarakat masih bergantung pada kearifan lingkungan sebagai sumberdaya aktivitas ekonomi. Perubahan iklim tanpa disadari telah memproduksi siklus musim yang tidak beraturan dengan musim kemarau yang lebih panjang serta suhu udara yang meningkat. Sementara itu pembangunan talud dan sedimentasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya, terbukti dari beberapa telaga yang mengering setiap musim kemarau panjang terjadi tahun demi tahun (Apriyani et al. 2022).

Kondisi ini berpengaruh secara signifikan pada aktivitas ekonomi masyarakat lokal tradisional yang notabene memanfaatkan air telaga sebagai sumber daya utama. Masyarakat terpencil seperti di Kabupaten Gunungkidul yang hidup jauh dari pusat kota dengan peradaban modernitas menjadikan lingkungan sebagai tulang punggung kehidupan dan penghidupan untuk menjaga stabilitas dan resiliensi, seperti pertanian, peternakan, dan bahkan pariwisata (Nugroho et al. 2020). Apabila kondisi kerusakan lingkungan tersebut tidak ditangani secara intensif dan terukur melalui konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, masyarakat lokal akan semakin menderita sebab sumber penghasilan mereka terganggu akibat lingkungan yang rusak. Padahal, data menunjukkan bahwa terdapat 122,54 juta penduduk miskin atau 15,60% dari total keseluruhan penduduk di kabupaten tersebut (Gunungkidul 2024). Berdasarkan kesenjangan ini, Komunitas Resan sebagai wadah perkumpulan masyarakat lokal di Gunungkidul melakukan giat sosial-ekologis sebagai wujud penguatan adaptasi lokal terhadap perubahan iklim dan fungsi lingkungan yang terjadi. Studi ini selanjutnya akan berfokus pada bagaimana strategi Resan dalam konservasi lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

Data dari Bidang Sumber Daya Air DPUPRKP Gunungkidul mencatat terdapat 344 dari 359 telaga yang ada mengalami kekeringan saat musim kemarau (Pertana 2023). Data lainnya mengungkap bahwa terdapat 460 telaga di Gunungkidul dan 95% di antaranya selalu mengering sehingga tidak dapat difungsikan saat musim kemarau (Padmo, 2024). Jumlah telaga kering tersebut dapat dikatakan cukup signifikan mengingat fakta bahwa seberapa penting manfaat telaga bagi kehidupan masyarakat di Gunungkidul (Yogi 2020). Beberapa faktor lain yang ditengarai menjadi penyebab keringnya telaga adalah eksploitasi akuifer, perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian yang intensif, dan penurunan mata air bawah tanah (Nugroho et al. 2020).

Beberapa faktor tersebut menunjukkan bahwa keringnya telaga merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh berbagai penyebab baik dari faktor alam maupun manusia. Kondisi lingkungan alam yang telah berubah sayangnya tidak diiringi dengan kesadaran dan kapasitas manusia untuk konservasi lingkungan. Manusia hanya mengambil manfaat sumber daya alam dengan tanpa memberikan timbal balik berupa konservasi lingkungan dan justru cenderung destruktif seperti pembangunan telaga. Berdasarkan fenomena ketimpangan tersebut, penting untuk meningkatkan kapasitas kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait konservasi lingkungan dalam rangka pengembangan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan itu sendiri.

Degradasi kualitas lingkungan memberikan dampak destruktif pada keseimbangan kehidupan manusia yang hidup di sekitarnya. Sebagaimana kasus di Telaga Dondong, Gunungkidul yang selalu kekeringan air saat kemarau. Padahal sejak dahulu selalu dikisahkan bahwa air telaga tidak pernah surut dan selalu mampu membantu masyarakat sekitar di dua dukuh (Dukuh Dondong dan Dukuh Mojosari) untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Ketidakberfungsian lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan manusia akan menyebabkan polemik serius pada aspek ekologis, ekonomis, dan sosio-kultural masyarakat (HM 2011).

Kondisi air telaga yang habis, ditambah dengan musim kemarau yang semakin panjang, daerah di sekitar telaga menjadi lebih kering dan gersang. Pohon-pohon terlihat layu dengan tanpa daun dan tidak sedikit pohon yang tumbang. Artinya, ekosistem yang dahulu terjaga dengan baik di sekitar telaga saat ini rusak sebab matinya salah satu elemen pendukung dalam ekosistem. Di samping itu, keringnya telaga juga berdampak pada aspek ekonomi masyarakat di sekitar telaga yang memfungsikan air telaga untuk kebutuhan sehari-hari. Melihat keadaan telaga saat ini yang sudah tidak dapat difungsikan seperti dahulu, masyarakat harus memperoleh pasokan air dari pihak luar yakni bisnis penyedia air yang dikelola pemerintah seperti PDAM dan SPAMdes. Sementara realitas menunjukkan kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan, kebutuhan masyarakat atas air ialah cukup banyak yakni selain untuk mandi, cuci, dan kakus, air juga difungsikan untuk minum, minuman ternak, memandikan ternak, irigasi sawah, dan perikanan (P. Gunungkidul 2007). 1 tanki air berukuran 5000 liter (pembelian air masih menggunakan sistem dropping bukan pemipaan) didistribusikan dengan harga Rp. 130.000,-140.000,- dan kemungkinan hanya dapat bertahan maksimal satu minggu dengan penggunaan hemat (Wibowo 2023). Kondisi tersebut cukup berisiko pada pemiskinan penduduk sekitar dalam jangka panjang sebab berkaitan dengan aspek hidup dan penghidupan mereka. Terakhir dari aspek sosio-kultural, keringnya telaga telah berdampak pada kebersamaan dan kesetaraan sejumlah lapisan sosial dalam masyarakat yang dahulu sama-sama mengambil sumber daya dari telaga. Telaga di Gunungkidul secara umum dan secara khusus di Telaga Dondong difungsikan sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Selain menjadi tempat bertemu dan silaturahmi masyarakat ketika mengambil air, telaga juga menjadi lokasi pelaksanaan sejumlah ritual

kebudayaan dan keagamaan masyarakat lokal. Sayangnya, keringnya telaga menyebabkan hilangnya fungsi telaga sebagai pusat aktivitas masyarakat tersebut (Observasi 2024).

Situasi empiris kondisi lingkungan di atas, selanjutnya membutuhkan adaptasi masyarakat berupa konservasi lingkungan berbasis masyarakat. Studi ini akan mengungkap bagaimana strategi Komunitas Resan bersama masyarakat di Gunungkidul dalam menghadapi isu ekologis terutama atas kebutuhan air. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, penelitian ini akan berfokus pada suatu masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yaitu masyarakat di Padukuhan Dondong, Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari yang melakukan revitalisasi Telaga Dondong. Resan pada setiap kegiatannya secara organik mementingkan aspek sinergi-kolaborasi antar sejumlah pihak dalam model pentahelix dengan menjembatani komunikasi masyarakat lokal kepada para *stakeholder*. Komunitas ini bergerak sejak 2017 yang meskipun berdiri tanpa legalitas dan struktur organisasi, telah berhasil menginternalisasi kesadaran dan partisipasi masyarakat di Gunungkidul. Di samping kapasitas pengetahuan dan kepedulian masyarakat lokal terhadap lingkungan yang meningkat, sejumlah telaga yang awalnya kering beberapa di antaranya teridentifikasi telah memunculkan mata air dan resisten terhadapnya (Assalimi and Yuanjaya 2023).

Diskusi mengenai konservasi lingkungan baik di ranah internasional, nasional, bahkan Gunungkidul sejatinya telah banyak dilakukan. Amy S. Teller dari *Brown University* dalam risetnya telah menemukan bahwa perubahan fungsi lingkungan telah mereproduksi ketimpangan di tingkat lokal khususnya dua komunitas petani di Tanzania. Amy secara gamblang melihat bahwa kebiasaan konservasi lingkungan di ranah lokal sebagai bagian yang terpisah dari pembangunan di negara-negara berkembang sehingga seringkali minim dampak dan kurang berkelanjutan. Amy juga mengingatkan bahwa upaya adaptasi masyarakat untuk maksud konservasi perlu difasilitasi dan ditingkatkan melalui kebijakan dan perubahan kelembagaan (Teller 2016). Sementara itu, I Gede Made menambahkan bahwa konservasi

lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat perlu didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka optimalisasi program konservasi. Keberadaan teknologi penting untuk difungsikan untuk menyebarkan paham baik kepada masyarakat untuk ekosistem lingkungan (Antara 2021). Pada studi lain di daerah Bantul, Khairina dan kawan-kawan berargumen bahwa kebijakan lokal dari pemerintah akan sangat membantu konservasi lingkungan sebagai wujud resiliensi, stabilitas, dan pelestarian mata pencaharian masyarakat (Khairina, Purnomo, and Malawnai 2020). Beberapa penelitian terdahulu di Gunungkidul juga telah membahas topik ini seperti halnya Sudarmaji dkk yang membandingkan konservasi mata air di Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari dan Perbukitan Karst, Gunungkidul dari perspektif biologi (Sudarmaji, Slamet Suprayogi, M. Widyastuti 2011). Studi lain mengungkap sejumlah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga telaga Omang dan Ngloro di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul (Sulastriyono 2012). Sebagai tambahan, Assalimi dan Yuanjaya pernah melakukan studi yang spesifik membahas Komunitas Resan Gunungkidul. Pada artikel miliknya mereka berargumen bahwa komunitas ini bergerak dengan model *collective action* dengan beberapa elemen dasar adalah kepentingan, organisasi, mobilisasi, dan peluang (Assalimi and Yuanjaya 2023).

Pemetaan studi terdahulu di atas menunjukkan bahwa konservasi lingkungan belum dinalisa lebih jauh dari aspek pengembangan masyarakat serta perspektif etika lingkungan. Pembahasan terkait konservasi lingkungan pada gerakan akar rumput cenderung hanya memotret konservasi sebagai sebuah keniscayaan yang muncul pada suatu komunitas, ditunjukkan dengan kearifan lokal yang relevan dengan tindakan tersebut. Artinya, *indigenous belief* masih dipandang sebagai upaya preventif terhadap isu lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat, sementara itu kondisi dan situasi lingkungan serta masyarakat saat ini sudah jauh berubah. Interpretasi tersebut cenderung menempatkan kekayaan lokal masyarakat seperti tradisi, budaya, dan kosmologi sebagai instrumen sosial yang kaku dan statis atau tidak dapat

berkembang. Pada konteks ini, pendekatan pengembangan masyarakat diperlukan untuk mendayagunakan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat sebagai instrumen pembangunan untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat (*by, with, and for the people*). Integrasi kearifan lokal sebagai instrumen pengembangan masyarakat akan mendukung munculnya pembangunan berkelanjutan serta metode dinamis yang fleksibel bagi masyarakat ketika menghadapi permasalahan seperti sosial-ekologis (Chaiphar et al. 2013).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat menarik untuk menelusuri secara lebih holistik terkait suatu gerakan lokalitas untuk konservasi lingkungan dengan pendekatan pengembangan masyarakat dan etika lingkungan. Perspektif pengembangan masyarakat akan membantu penalaran dan analisis terkait bagaimana suatu komunitas lokal dapat memberdayakan masyarakat yang lebih inklusif dengan kehadiran para pemangku kebijakan yang dapat memfasilitasi konservasi lingkungan. Sementara itu, analisis etika lingkungan pada studi ini dapat menjadi kajian interdisipliner sebagai sandaran fundamental disiplin ilmu dalam konteks normatif yang membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagai alternatif wacana penyelamatan lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem. Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah ingin mendalami strategi Komunitas Resan dalam konservasi lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Gunungkidul melalui perspektif pengembangan masyarakat dan etika lingkungan.

Di tengah gelombang pembangunan yang terus menerus dilaksanakan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, menelusuri upaya konservasi lingkungan untuk pengembangan masyarakat tentu memiliki urgensi tersendiri. Studi ini penting untuk memotret bagaimana konfigurasi dan kondisi konservasi lingkungan di tingkat lokal yang jarang sekali memperoleh atensi dari pihak luar masyarakat. Pasalnya, negara telah mengatur bagaimana idealitas pembangunan di Indonesia tepatnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (B. RI 2009). Terbaru, Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan No. 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (K. L. RI 2024). Artinya konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan untuknya, merupakan suatu tindakan yang legal dan wajib dicanangkan dalam pembangunan nasional. Kedalaman untuk mengungkap dimensi konservasi lingkungan di tingkat lokal akan sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi tidak hanya permasalahan serta tantangan yang dihadapi, namun sekaligus urgen untuk memberi alternatif menuju pembangunan nasional yang lebih konservatif terhadap lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi konservasi lingkungan berbasis komunitas dilaksanakan?
2. Bagaimana tipe etika lingkungan yang diterapkan dalam konservasi lingkungan berbasis komunitas di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk; *Pertama*, memperdalam (*deepening*) kajian konservasi lingkungan berbasis masyarakat di Indonesia sebagai negara berkembang dengan mempertimbangkan ciri khas suatu wilayah dan aspek lokalitas lainnya. Pemilihan lokasi penelitian yang berada di wilayah lingkungan adat tentunya akan menawarkan pendalaman yang khas dengan kearifan lokal masyarakat yang tentunya berbeda satu sama lain. Kajian tentang konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal dan masyarakat selama ini memiliki pandangan bahwa kearifan lokal adalah keniscayaan yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Namun pandangan ini nampaknya kurang relevan untuk diterapkan pada lingkungan masyarakat yang telah rusak atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Komunitas Resan justru memiliki cara pandang yang unik terhadap kearifan lokal yang tumbuh

di masyarakat. Kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dijadikan pintu masuk untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat dalam konservasi lingkungan sehingga diharapkan mereka dapat mandiri dan melakukan hal tersebut secara berkelanjutan, sebagaimana yang tercermin pada konteks masyarakat di Padukuhan Dondong. Konsep konservasi lingkungan berbasis masyarakat yang diterapkan mendukung secara penuh pola partisipatoris, *bottom-up*, dan internal, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif (pelaku), sebab berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat adalah yang paling tahu terhadap kondisi, permasalahan, serta solusi terkait lingkungan hidup mereka. Strategi komunitas resan dapat ditetapkan menjadi salah satu konsep paten dalam integrasi konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di ranah lokal sehingga dapat direplikasi di lokasi yang berbeda dalam skala nasional maupun internasional.

Kedua, mendalami bentuk dan karakteristik etika lingkungan yang diterapkan pada konservasi lingkungan berbasis komunitas di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan ini setidaknya memiliki dua alasan pokok yakni pertama, memberikan ulasan deskriptif etika lingkungan pada konservasi lingkungan yang dapat tumbuh subur di wilayah dengan kerentanan ekologis serta kebutuhan masyarakat terhadap lingkungannya. Hubungan manusia dan lingkungan pada penelitian ini akan memberikan rekomendasi model etika lingkungan yang dapat diterapkan di tempat lain maupun di Kabupaten Gunungkidul di daerah yang berbeda. Pasalnya, konservasi lingkungan dalam pengembangan masyarakat pada giat sosial-ekologis Komunitas Resan merupakan model etika lingkungan terbaru setidaknya apabila dibandingkan dari sejumlah penelitian terdahulu yang hanya menempatkan konservasi lingkungan sebagai fakta sosial yang statis. Kedua, tinjauan etika lingkungan pada konservasi lingkungan berbasis komunitas di Kabupaten Gunungkidul dapat memudahkan peneliti untuk memberikan penajaman analisis terhadap data hasil penelitian. Pemikiran ini berangkat dari minimnya penelitian-penelitian terdahulu yang membahas sebuah konservasi lingkungan dari perspektif etika lingkungan.

Peneliti memahami bahwa konservasi lingkungan merupakan suatu aksi yang terbuka dan dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu, etika lingkungan sebagai disiplin ilmu yang menaungi hubungan antara manusia dengan lingkungan selanjutnya penting untuk dikontekstualisasikan pada suatu gerakan konservasi. Kontekstualisasi tersebut bertujuan agar etika lingkungan semakin menjadi diskursus yang lebih umum dan diimplementasikan pada kehidupan nyata sebagai unsur nilai dan norma antara kehidupan manusia dan biodiversitas di sekitarnya.

Melalui penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat atau kegunaan terhadap; *Pertama*, perkembangan kajian keilmuan bahwasannya pola konservasi lingkungan berbasis komunitas di Indonesia, tidak hanya terbatas pada diskusi menjaga lingkungan dan alam dengan kearifan lokal masyarakat. Lebih dari itu, konservasi lingkungan juga membutuhkan sentuhan dimensi pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal akan dikaji lebih dalam terkait fungsinya untuk mendukung suatu program konservasi lingkungan. Diskusi ini akan mengembangkan kajian-kajian terkait topik-topik pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal, konservasi lingkungan, dan kearifan lokal itu sendiri.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi input kebijakan bagi para pemangku kebijakan (*stakeholders*) dalam desain kebijakan terkait konservasi lingkungan, perumusan regulasi terkait konservasi lingkungan, serta informasi objektif berbasis studi ilmiah terkait konservasi lingkungan berbasis masyarakat. Beberapa input tersebut perlu menjadi pijakan bagi para pemangku kepentingan melihat kondisi dan konfigurasi konservasi lingkungan di tingkat lokal. Para pemangku kebijakan melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami secara komprehensif tentang bagaimana masyarakat adat beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi sebab harus berjuang untuk kemaslahatan bersama baik di masa kini dan masa depan. Adapun penerbitan regulasi dan kebijakan dapat menyesuaikan pada kondisi masyarakat tersebut yang bersifat mendorong dan mendukung upaya adaptasi tersebut.

Di samping itu, konteks konservasi lingkungan berbasis masyarakat yang dibahas pada studi ini diharapkan dapat menstimulasi dan menjadi contoh bagi masyarakat lain lintas daerah maupun internasional terkait resiliensi penduduk di daerah terdampak perubahan iklim dan fungsi lingkungan.

D. Kajian Pustaka

Studi mengenai konservasi lingkungan telah menjadi konsentrasi sejumlah peneliti baik di kancah internasional maupun nasional. Konservasi yang secara arti harfiah adalah melestarikan, dianggap perlu disematkan pada lingkungan sebab setidaknya dua alasan utama. Pertama, sebab mulai muncul kesadaran pada manusia terkait pola hidup manusia yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Baik-buruk, kaya-miskin, banyak-sedikit sumber daya yang disediakan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia terlebih pada aspek ekonomi dan sosio-kultural. Namun perlu menjadi catatan, bahwa kebermanfaatan lingkungan terhadap kehidupan manusia juga tergantung dari seberapa dalam kapasitas manusia dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, perubahan lingkungan dan alam baik yang secara perlahan maupun signifikan dirasakan manusia sebab berpengaruh terhadap kepentingan manusia. Atas dasar kedua argumen tersebut, gerakan konservasi lingkungan muncul sebagai upaya adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan memiliki visi untuk memperbaiki fungsi lingkungan. Adaptasi ini mulai digaungkan sejak Lynn White mengeluarkan tesis yang cukup menohok pada studi miliknya yang berbunyi “Apa yang manusia perbuat terhadap lingkungan alamnya tergantung dari apa yang manusia pikirkan terhadapnya dan hubungan dirinya dengan berbagai komponen alam lain di sekitarnya” (Marfai 2013). Pada sajian ini selanjutnya akan dibahas beberapa penelitian terdahulu untuk merangkum sejumlah penemuan dan argumentasi penelitian yang telah ada, sehingga akan mempermudah pembaca untuk menemukan kesenjangan literatur dan kebaruan pada penelitian ini.

Penelitian yang membahas terkait konservasi lingkungan telah dianalisa dari beragam perspektif dan multidisipliner. Salah satu yang paling populer dan masif adalah perspektif geografi pada konservasi lingkungan seperti riset milik Magdalena dkk dengan judul “*Spatial Analysis Guiding Decision Making in Environmental Conservation: Systematic Conservation Planning and Ecosystem Services*”. Studi ini berfokus pada kontribusi geografi dalam konservasi lingkungan pada area terlindung dengan pendekatan perencanaan konservasi sistematis dan pelestarian ekosistem. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa hutan lindung di negara-negara sub-tropis di Amerika Selatan seperti Brazil, hasil analisis menggunakan kedua pendekatan konservasi tersebut sering dijadikan sebagai pertimbangan untuk perumusan kebijakan berhaluan pembangunan berkelanjutan. Magdalena menguji hasil konservasi lingkungan melalui kedua pendekatan tersebut dengan perspektif geografi yakni analisis spasial utamanya pada konteks konsep hutan lindung dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, pendekatan konservasi lingkungan yang difungsikan untuk alokasi dan pembatasan area terlindung, dan korelasi antara spasial analisis dengan penggunaan pendekatan pelestarian ekosistem dan perencanaan konservasi sistematis. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, Magdalena dkk berargumentasi bahwa analisis spasial sebagai amplifikasi disiplin ilmu geografi memiliki peran yang dapat memudahkan kedua pendekatan tersebut. Spasial analisis berfungsi untuk mengukur dan mendeskripsikan pola dari fenomena abstrak yang ditemukan sebagai paradigma metodologis esensial dalam kuantifikasi dan pembatasan elemen-elemen lingkungan serta proses natural. Argumentasi ini perlu menjadi rujukan dan sandaran normatif bagi pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan upaya konservasi lingkungan di area hutan lindung atau ekosistem tertentu (Magdalena et al. 2023).

Tinjauan geografi pada konservasi lingkungan hutan lindung di atas diperkuat dengan tinjauan pembangunan dan pengembangan masyarakat pada penelitian milik Gupta berjudul “*Conservation is Development in The Forest of Nagarhole Tiger Reserve, India*”. Pada studi

ini, Gupta menekankan bahwa dalam pembangunan suatu bangsa, pemerintah perlu mengumpulkan sejumlah kajian saintifik objektif di wilayah-wilayah otoritasnya, dan menjadikan konservasi sebagai satu paket pembangunan. Gupta meyakinkan bahwa konservasi lingkungan selain manfaatnya untuk menunjang perekonomian masyarakat, adalah hal yang inheren dengan program pembangunan. Argumentasi tersebut muncul berdasarkan penelitian miliknya pada hutan taman nasional Nagarhole Tiger Reserve di India. Sejak zaman penjajahan hingga masa setelah kemerdekaan, upaya pemerintah setempat untuk konservasi lingkungan selalu berdasar pada praktik-praktik adat dan pengalaman komunitas lokal yang tinggal di Nagarhole. Sejumlah proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di atas lingkungan Nagarhole selalu menjadikan masyarakat sebagai rekan pembangunan yang tidak hanya mengawasi, namun juga berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan pendapat pembangunan. Pada konteks pembangunan tersebut, masyarakat akan mengetahui secara komprehensif tentang apa pembangunan yang sedang dilakukan, bagaimana visi pembangunannya, sehingga menghindarkan lingkungan dari eksploitasi kontrol dan transformasi destruktif (Gupta 2021).

Namun meski kearifan lokal sebagaimana dalam penelitian Gupta di atas dapat berkontribusi pada program pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selamanya kearifan lokal selalu berbanding lurus dengan konservasi lingkungan. Medeiros dkk dalam artikel berjudul “*Traditional Knowledge on The Use of Turtles in a Protected Area of The Amazon in Maranhao (Brazil): A Conservation Proposal*” menemukan bahwa terdapat pola kegiatan masyarakat yang destruktif dan mengeksploitasi lingkungan bahkan mengganggu ekosistem. Tepatnya di Baixada Maranhense Environmental Protection Area (EPA), penduduk lokal pinggiran sungai memburu kura-kura jenis *kinosternon scorpiodes* yang tentunya dilindungi, untuk persembahan ritual dan pengobatan tertentu. Masyarakat lokal berasumsi bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tradisi turun temurun dan mereka mengaku tidak

mengetahui secara ilmiah tentang dampak tradisi tersebut. Dampak tradisi pemburuan tersebut berakibat fatal pada jumlah kura-kura di habitatnya sehingga mengganggu pada ekosistem dalam air. Selanjutnya melalui kajian mengenai tradisi masyarakat pinggir sungai tersebut, Medeiros dkk mengajukan permohonan untuk segera dilakukan upaya konservasi berbasis masyarakat demi menyelamatkan populasi kura-kura jenis tersebut di habitat endemiknya (Medeiros et al. 2023).

Konsep konservasi hutan lindung sebagai upaya penyelamatan ekosistem setempat pada studi lain dihubungkan dengan aspek mata pencaharian masyarakat yang artinya merangkap konsep pembangunan dan pengembangan masyarakat. Artikel milik Gidebo berjudul *“Linking Livelihood and Biodiversity Conservation in Protected Areas: Community Based Tourism Development Perspective from Developing Countries”* menemukan bahwa upaya untuk menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara implementasi pengembangan wisata berbasis masyarakat. Aktivitas masyarakat Ethiopia sebagai negara berkembang khususnya di Taman Nasional Nech Sar cenderung tidak bersifat ramah lingkungan bahkan bersifat destruktif terhadap biodiversitas lokal seperti penggunaan konsumtif sumberdaya alam yang berlebihan, bencana kebakaran yang berulang, perambahan pertanian, dan penangkapan ikan secara ilegal. Sementara itu, masyarakat lokal juga mengalami sejumlah kerentanan seperti keterbatasan pangan, konflik penggunaan sumberdaya alam, dan kemiskinan. Pada konteks ini, Gidebo berupaya untuk menjembatani kepentingan kedua entitas tersebut yakni manusia dan lingkungan dengan pendekatan *community based tourism*. Pembukaan lokasi wisata berbasis masyarakat di area taman nasional adalah alternatif efektif untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan menjadi lebih konservatif. Masyarakat diarahkan untuk bersikap baik dan menjaga kearifan lingkungan di sekitarnya sebab lingkungan tersebut memberi dampak positif sebagai pariwisata yang dapat menyelamatkan masyarakat dari belenggu kemiskinan (Gidebo 2023).

Argumentasi Gidebo tersebut menekankan bahwa konservasi lingkungan perlu menginput tinjauan pengembangan masyarakat supaya terbentuk suatu upaya pembangunan berkelanjutan dan penyelamatan kesejahteraan masyarakat lokal. Serupa namun berbeda, Sullivan dan Syvertsen menangkap nilai yang sama dengan Gidebo dalam artikel berjudul *“Conservation Leadership: A Developmental Model”*. Pada artikel miliknya, Sullivan dan Syvertsen berfokus pada gerakan sosial pemuda lokal dalam rangka memimpin dan berkampanye terhadap masyarakat yang lebih luas untuk upaya konservasi lingkungan. Studi ini berfokus pada sebuah program kepemimpinan konservasi nasional yang dilaksanakan di Amerika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki kapasitas dan integritas untuk menjadi pelopor konservasi lingkungan dalam pengembangan masyarakat. Output dari program yang dilakukan oleh pemuda setidaknya diharapkan dapat mendorong kesadaran konservasi di tingkat nasional dan berpartisipasi nyata pada inisiasi kebijakan berbasis lingkungan. Para pemuda dianggap memiliki kekuatan yang lebih dari generasi masyarakat lain sebab masih mampu untuk meningkatkan pembangunan tindakan, motivasi, dan pemahaman masyarakat yang berorientasi pada konservasi (Sullivan et al. 2019).

Pada artikel yang berbeda, kepemimpinan juga dianggap sebagai alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan tata kelola lingkungan dan bumi yang mulai mengarah pada kerusakan. Case dkk dalam artikel berjudul *“Rethinking Environmental Leadership: The Social Construction of Leaders and Leadership in Discourses of Ecological Crisis, Development, and Conservation”* pertama-tama memisahkan antara konstruksi sosial antara pemimpin dan kepemimpinan. Sebagai seorang figure, pemimpin menjadi aktor utama penentu arah kebijakan dari suatu kelembagaan yang ia pimpin sementara kepemimpinan memiliki aspek yang lebih luas yakni menyorot dinamika aspek yang dipimpin seperti politik, ekonomi, dan sosial. Studi ini menemukan bahwa pada kepemimpinan seorang pemimpin di suatu lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, ilmu-ilmu lingkungan seperti etika

lingkungan dan geografi sangat penting untuk dimiliki. Pasalnya, kapasitas ilmu lingkungan seorang pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap keberpihaka kebijakan yang diterbitkan yang tentunya memiliki dua potensi yang berbeda yaitu konservasi maupun eksploitasi atau destruksi. Studi ini juga menekankan bahwa politik ekologi terhadap narasi krisis lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan di atas lingkungan (Case et al. 2015).

Para sosiolog juga memberikan kontribusinya terhadap diskusi konservasi lingkungan. Amy S. Teller menghadirkan tinjauan sosio-ekologis untuk menyorot konservasi lingkungan terhadap perubahan iklim dalam artikel berjudul “*Moving The Conversation on Climate Change and Inequality to The Local*”. Perubahan iklim telah merubah musim di Tanzania, sementara para petani bergantung pada pertanian tadah hujan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat lokal. Kerentanan sosio-ekologis tersebut jika tidak ditangani secara cepat dan tepat oleh masyarakat miskin akan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar sebab iklim telah berdampak langsung pada mata pencaharian utama masyarakat. Pada titik ini, masyarakat lokal di dua lokasi di Tanzania berdasarkan hasil penelitian Amy, melakukan upaya adaptasi berdasarkan pengetahuan lokal melalui rekayasa pertanian. Namun meski telah dilakukan adaptasi, upaya masyarakat agraris tersebut masih belum mampu untuk menghadapi kerentanan perubahan iklim di lingkungan mereka. Kondisi yang miris ini disebabkan kapasitas pengetahuan dan kapabilitas masyarakat masih cenderung minim. Pada titik ini, Amy berargumen bahwa upaya konservasi lingkungan di ranah lokal perlu ditangani secara serius dan difasilitasi. Pemerintah khususnya perlu memberikan atensi lebih untuk menjaga stabilitas dan resiliensi masyarakat untuk bertahan hidup dan sejahtera di wilayah otoritasnya (Teller 2016).

Berkaitan dengan studi Amy tersebut, Alberts dkk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap suatu komunitas di Namibia dengan judul artikel “*Developing a Deliberatif-Delphi Method for Informing National Conservation Capacity Development*

Strategies". Penelitian berbasis pengabdian dan pengembangan ini memiliki pandangan bahwa formulasi kebijakan suatu negara yang berfokus pada konservasi lingkungan perlu menghadirkan pendekatan kajian inter-disiplin untuk menjadi landasan keilmuan dan manajemen dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat di negara berkembang. Pengembangan kapasitas masyarakat diperlukan untuk mendesain konservasi jangka panjang pada suatu masyarakat tertentu. Demikian, Alberts dkk selanjutnya menerapkan model musyawarah dan workshop untuk menentukan respon cepat terhadap wacana konservasi lingkungan/ekologi, kepemimpinan konservatif, dan harapan di masa depan. Hasil musyawarah dan workshop yang telah dilakukan selanjutnya menghasilkan identifikasi dan sejumlah prioritas konservasi lingkungan yang perlu ditangani. Lebih dari itu, sebagaimana yang diharapkan Amy pada studi sebelumnya, identifikasi dan prioritas konservasi tersebut dimodifikasi menjadi kebijakan konservasi oleh pemerintah setempat guna sebagai peta konsep konservasi di wilayah otoritasnya. Peta konsep tersebut meliputi perencanaan pembangunan, agenda riset untuk keseimbangan program, dan perubahan kebijakan di masa depan. Artinya, studi ini memfasilitasi masyarakat dengan musyawarah untuk menyampaikan masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai kebijakan prioritas pemerintah lokal (Alberts et al. 2024).

Integrasi antara program konservasi lingkungan dengan pembangunan sebenarnya telah dilakukan di China sebagaimana telah diteliti oleh Melinda dalam artikel berjudul "*Integrating Conservation and Development: What We Can Learn from Caohai, China*". Kepentingan konservasi dan pembangunan memang sering kali tidak dapat dipertemukan pada daerah-daerah tertentu. Konsep ICDPs (*Integrated Conservation and Development Projects*) selanjutnya dikampanyekan untuk konservasi biodeversitas dan sekaligus mengembangkan perekonomian lokal sebagai jalan tengah untuk mereduksi resiko perusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat marjinal. Penelitian ini selanjutnya ditujukan untuk mengulas

implementasi program pengembangan masyarakat dan konservasi (ICDPs) di suatu komunitas di Caohai, China yang diinisiasi oleh sejumlah lembaga swasta (NGO) dan pemerintah. Hasil dari penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa implementasi program di Caohai meskipun menunjukkan sejumlah kegagalan dan keberhasilan, program ini telah berhasil untuk mengubah ketidakharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan menjadi hubungan yang lebih kooperatif. ICDPs sebagai program eksternal yang diterapkan kepada masyarakat dinilai mampu untuk menjadi resolusi konflik di antara kedua entitas (Herrold-Menzies 2016).

Sementara itu implementasi program *Integrated Conservation and Development Projects* (ICDPs) di Namibia, digunakan untuk menjadi solusi atas konflik antara manusia dengan lingkungan khususnya konservasi kehidupan hewan liar. Mufune dalam artikel berjudul “*Community Based Natural Resource Management (CBNRM) and Sustainable Development in Namibia*” menguji sejumlah misi ICDPs di daerah terlindung di Namibia. Beberapa misi yang dimaksud seperti partisipasi komunitas lokal dalam konservasi sumberdaya alam dan pelestarian dan biodiversitas di satu sisi dan reduksi kemiskinan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa upaya konservasi yang dipimpin oleh masyarakat lokal membawa dampak positif terhadap perlindungan satwa liar yang hidup di area taman nasional. Jumlah populasi satwa liar terutama yang dilindungi bertambah cukup pesat. Masyarakat bersikap mendukung terhadap program sebab di sisi lain juga berkontribusi baik terhadap mata pencaharian mereka. Kesejahteraan masyarakat lokal meningkat sebab kemiskinan dapat tertangani dengan penciptaan sejumlah mata pencaharian baru bagi masyarakat serta pembagian keuntungan yang tepat. Masyarakat yang sebelumnya acuh dengan kehidupan satwa liar bahkan cenderung memiliki konflik, selanjutnya menjadi lebih apresiatif terhadap keharmonisan hubungan yang telah terjalin (Mufune 2015).

ICDPs juga diterapkan di Belanda sejak 2011 untuk memproteksi sejumlah spesies burung yang bermigrasi di Kota Sahel dengan menciptakan praktik penggunaan lahan

berkelanjutan dalam rangka restorasi habitat dan konservasi sekaligus menambah mata pencaharian masyarakat lokal. Temuan ini dimuat dalam artikel yang ditulis oleh Van Den Bergh berjudul *“The Role of Community Organisations in Integrated Conservation and Development Projects: Local Perspectives from The Sahel Region”*. Pada program tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan terhadap masyarakat melalui kelompok konservasi lokal untuk melakukan intervensi pada pelaksanaan program di tiga daerah tertentu. Studi ini menemukan bahwa program ICDPs yang diterapkan di negara maju seperti Belanda cenderung lebih berorientasi pada kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Mereka dibebaskan untuk berpikir secara kritis mengenai tantangan program dan alternatif yang dapat ditempuh, lalu berkesempatan untuk menyampaikan hasil pemikiran tersebut terhadap pemerintah. Adapun beberapa karakteristik penting yang ditemukan oleh peneliti dalam mengungkap peran para kelompok konservasi lokal tersebut di antaranya adalah desentralisasi, pendekatan partisipatif, dan pemberdayaan lokal (Bergh 2015).

Namun perlu dipahami bahwa integrasi antara pembangunan/pengembangan masyarakat dengan konservasi lingkungan bukan merupakan hubungan yang mudah. Perbedaan orientasi dan visi yang dimiliki oleh masing-masing gerakan seringkali menjadi pembatas dan pemisah kedua spektrum baik tersebut di masyarakat. Kondisi ini sebagaimana yang ditemukan oleh Pratiwi dan Juerges di Indonesia dalam sebuah artikel berjudul *“Advocacy Coalitions and Knowledge Transfer within Geothermal Policy Change in Indonesian Conservation Forests”*. Penggunaan energi geotermal bersifat mengganggu terhadap manajemen konservasi hutan lindung di Indonesia. Pada satu dekade terakhir, upaya perubahan kebijakan yang mengatur hubungan antara kedua kepentingan tersebut nyatanya masih suka untuk dicapai. Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa aktor kunci yang melatarbelakangi perubahan kebijakan pada topik tersebut memiliki dua orientasi yang berbeda yakni orientasi pembangunan dan koalisi konservasi. Lemahnya integrasi dan implementasi

kebijakan berbasis keilmuan telah menciptakan konflik lingkungan, yakni mandeknya proyek geotermal ramah lingkungan di wilayah konservasi hutan lindung. Pratiwi dan Juerges berpendapat bahwa kebijakan integratif dan berkelanjutan perlu segera dilaksanakan sebagai upaya resolusi konflik kepentingan penggunaan energi geotermal sehingga tidak berdampak buruk kepada konservasi lingkungan termasuk pula masyarakat lokal yang hidup di sekitarnya (Pratiwi and Juerges 2022).

Tafon dan Saunders menemukan konteks yang sama dengan Pratiwi dan Juerges pada konservasi lingkungan di Taman Nasional Mount Cameroon pada artikel berjudul “*Power Relations and Cassava: Conservation and Development in Cameroon*”. Menghubungkan konservasi dengan aktivitas pembangunan memerlukan perubahan sikap masyarakat lokal sehingga dapat menyelenggarakan konservasi yang lebih global dan berdampak pada reproduksi manfaat sosio-ekonomi masyarakat. Namun meski demikian, pemerintah dan masyarakat tidak memiliki hubungan yang harmonis terindikasi dari kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Studi ini menemukan bahwa kolaborasi antara pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan institusi tradisional justru mengurangi partisipasi, kegagalan untuk mendengar aspirasi, dan menyampaikan makna penting dari pembangunan kepada masyarakat Desa Bavenga. Pada konteks ini, peneliti menilai bahwa terdapat dominasi relasi kuasa yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Dominasi tersebut dapat menyebabkan kegagalan tercapainya tujuan utama pengembangan masyarakat dan konservasi lingkungan. Tafon dan Saunders selanjutnya memberikan rekomendasi bahwa relasi kuasa yang paling kuat pada integrasi konservasi dan pembangunan seharusnya tetap berada di pihak masyarakat lokal. Pemberian otoritas lebih terhadap masyarakat tradisional memiliki tujuan agar masyarakat lokal menghayati proyek tersebut dan menjalankan fungsi lokalitas (Tafon et al. 2015).

Menyatukan dua gagasan penting konservasi dan pembangunan juga tidak akan efektif apabila kapasitas dan pengetahuan masyarakat lokal terkait pembangunan tidak ditingkatkan. Soltau pada artikel berjudul *“The Cost of Rainforest Conservation: Local Responses towards Integrated and Development Projects in Cameroon”* berargumentasi bahwa istilah partisipasi masyarakat tidak lebih dari bualan semata apabila pemerintah tidak memberikan penalaran dan pemahaman komprehensif terkait konservasi lingkungan dan potensi mata pencaharian masyarakat. Studi ini menemukan bahwa implementasi ICDPs di Kamerun sebagai negara berkembang tidak diiringi dengan kompensasi terhadap masyarakat atas program pembangunan yang telah dilakukan negara di atas lingkungan hidup. ICDPs sebagai wacana konservasi global selanjutnya diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka menunjukkan afeksi pemerintah terhadap masyarakat yang telah hilang sumber penghasilannya dan terdegradasi ekonominya. Studi ini selanjutnya memberikan pernyataan bahwa kegagalan ICDPs di negara-negara berkembang sebenarnya dilandasi bukan karena kecacatan program namun sebab minornya integrasi-kolaborasi masyarakat dan pemerintah (Schmidt-Soltau 2015).

Integrasi antara pembangunan dan konservasi juga akan sulit untuk diraih apabila konflik kepentingan yang terjadi di ranah lokal belum ditangani dengan tepat. Argumentasi ini dibangun berdasarkan artikel milik Silwal dkk dengan judul *“Do Buffer Zone Programs Improve Local Livelihoods and Support Biodiversity Conservation? The Case of Sagarmatha National Park, Nepal”*. Studi ini mengkaji terkait program daerah penyangga yang didesain untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat sekitar taman nasional dengan varietas biodiversitas liar di sekitar lingkungannya sekaligus mengoptimalkan mata pencaharian masyarakat sehingga dapat lebih sejahtera. Daerah penyangga merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah setempat dengan visi menjanjikan pengembangan masyarakat yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan daerah penyangga memang

berhasil untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat dengan alokasi 42% dana programnya, namun pemerintah melalui program daerah penyangga belum mampu untuk memanajemen konflik yang terjadi antara manusia dan hewan liar di area taman nasional. Meskipun telah terdapat kompensasi terhadap manusia yang terserang satwa liar dan diatur secara konstitusional, namun sentuhan hukum tersebut tidak menyelesaikan konflik secara preventif. Kondisi yang demikian pada akhirnya hanya akan mengakibatkan partisipasi masyarakat lokal hilang dalam program dan sehingga tujuan dari program akan bias. Kenyataan yang terjadi area taman nasional perlu menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk memperbarui ketentuan kebijakan sehingga lebih berorientasi pada masyarakat lokal (Silwal et al. 2022).

Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi di Filipina sebagai negara berkembang, upaya konservasi lingkungan berbasis masyarakat kurang memperoleh atensi dan dukungan dari pemangku kebijakan. Integrasi di antara konservasi lingkungan di tingkat lokal dengan partisipasi pemerintah merupakan tantangan tersendiri yang cukup sulit ditembus. Artikel yang ditulis oleh Cagalan berjudul *“Integrated Conservation and Development: Impacts on Households in a Philippine Park”* mendeskripsikan bagaimana adaptasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat di Filipina. Masyarakat sekitar hutan lindung telah menyadari bahwa mereka perlu melakukan konservasi terhadap kawasan hutan demi menyelamatkan perekonomian mereka dari ancaman kemiskinan. Karakteristik gerakan mereka adalah desentralisasi, partisipasi lokal, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar konservasi lingkungan yang dilakukan masyarakat telah berkontribusi baik terhadap perekonomian masyarakat, namun aspek nilai dan etika lingkungan tidak tercapai sebab ketidakhadiran pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam program. Masyarakat cenderung melakukan sesuatu yang mereka anggap berorientasi konservasi namun tanpa tinjauan lebih lanjut dari kajian interdisiplin terkait kebenaran aksi yang mereka lakukan.

Tanpa disadari, aktivitas perekonomian masyarakat telah berdampak pada deforestasi atau pengurangan area yang berpotensi untuk regenerasi. Pada titik ini, Cagalanan berargumen bahwa strategi konservasi yang dilakukan perlu dieksplorasi lebih lanjut terlebih mendapat atensi dari para pemangku kebijakan setempat (Cagalanan 2018).

Untuk menjawab pertanyaan mengapa perspektif konservasi di tingkat lokal dan pemerintah seringkali tidak sinkron, Chambers dkk melakukan penelitian terukur di Peruvian Amazon dalam artikel berjudul “*Why Joint Conservation and Development Projects Often Fail: An In-depth Examination in The Peruvian Amazon*”. Studi ini berangkat dari keresahan akan janji para pemangku kebijakan tentang klaim konservasi lingkungan dapat memberikan kesejahteraan dan pelayanan hidup bagi masyarakat dalam jangka panjang, namun seringkali justru gagal. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya terdapat empat alasan mengapa upaya konservasi lingkungan cenderung gagal yakni seleksi mandiri individu yang memiliki kesamaan pola pikir (*local heroes*), terbatasnya kemampuan motivator ekstrinsik seperti materi dan perlindungan undang-undang dalam rangka mengurangi aksi deforestasi, terbatasnya internalisasi motivasi konservasi, dan mengabaikan pendorong ekonomi berbasis konservasi lingkungan sebagai upaya penghentian deforestasi. Pada dasarnya, studi tersebut ingin menyampaikan bahwa kesamaan paham antara masyarakat dan pemerintah merupakan suatu idealisme yang membutuhkan pendekatan kompleks. Berlandaskan pada kesimpulan tersebut, para peneliti melalui artikel miliknya memberikan saran bahwa untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda perlu dilaksanakan musyawarah secara inklusif untuk menemukan jalan tengah sebagai cita-cita bersama. Masyarakat tetap memperoleh sumberdaya untuk meningkatkan kualitas ekonominya, lingkungan tetap terjaga melalui upaya konservasi, serta pemerintah telah berhasil melakukan upaya pembangunan yang berorientasi konservasi (J. Chambers et al. 2020).

Sementara itu di Indonesia, pembangunan nasional sebagai negara berkembang dengan sejumlah konstruksi infrastruktur seperti jalan raya sering kali tidak berorientasi pada konservasi lingkungan yang baik. Sloan dkk dalam artikel berjudul “*Development Corridors and Remnant Forest Conservation in Sumatra*” mengulas secara lebih terperinci terkait mega proyek pemerintah yang akan membangun Jalan Tol Lintas Sumatra sejauh 2,700 Km dan dampaknya terhadap lingkungan. Meskipun visi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ini adalah untuk memfasilitasi aktivitas masyarakat dalam urusan pertanian dan perdagangan, namun proyek pembangunan ini akan kembali menggusur sebagian wilayah sisa hutan di Sumatra yang sebelumnya sudah berkurang akibat peluasan pemukiman penduduk. Sejumlah wilayah hutan yang diperkirakan akan mengalami deforestasi di antaranya adalah Taman Nasional Kerinci Seblat, Ekosistem Leuser, dan Batang Toru yang mana ketiganya memiliki peran penting dalam integritas ekologi di Sumatra. Deforestasi diperkirakan juga akan semakin meluas sebab manusia akan berpikir untuk menempati pinggiran wilayah hutan yang sudah gundul. Konstitusi nasional juga memiliki perlindungan yang lemah untuk memproteksi kawasan hutan yang belum memiliki label kawasan hutan lindung. Melalui studi ini, sejumlah peneliti menganjurkan kepada pemerintah untuk memperluas kawasan hutan lindung serta memberikan prioritas yang sepadan terhadap hutan selain hutan lindung dalam rangka konservasi lingkungan dan sejumlah spesies biodiversitas yang hidup di antaranya. Para peneliti juga menganjurkan sejumlah aktivis dan pemerhati konservasi hutan dan spesies yang hidup di dalamnya untuk melakukan aliansi hukum dalam rangka melindungi hutan. Pasalnya, data menunjukkan bahwa hampir setengah dari rute jalan raya tersebut masih menunggu proses pembebasan lahan yang kontroversial (Sloan et al. 2019).

Di samping itu perluasan infrastruktur, pembangunan di Indonesia nyatanya masih banyak yang tidak berorientasi terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu contoh kasus yang paling anyar adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana

diteliti oleh Aulia dkk dalam artikel berjudul “*Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN*”. Regulasi terbaru terkait telah menekankan bahwa ibu kota Indonesia saat ini sudah berpindah dari dahulunya Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Saat ini, proses pembangunan dan persiapan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota yang baru sedang gencar dilaksanakan di atas lahan seluas 262.814 hektar di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Studi Aulia dkk menemukan bahwa pembangunan IKN tidak melibatkan partisipasi serta pertimbangan dari masyarakat adat yang terlebih dahulu mendiami wilayah bakal pembebasan lahan, minimnya informasi dan transparansi program dari pemerintah kepada masyarakat, nihilnya keadilan baik berupa konservasi maupun kompensasi dari pemerintah kepada masyarakat yang direnggut hak sumberdaya alamnya, serta tidak adanya upaya manajemen penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan pihak yang bertanggung jawab pada pembangunan IKN. IKN yang notabene didirikan di atas wilayah milik masyarakat yang justru masyarakat diusir dari properti yang mereka miliki. Akibatnya, masyarakat adat setempat menderita sebab mata pencaharian mereka telah tiada sehingga kualitas perekonomian masyarakat yang menurun, hilangnya identitas dan budaya komunal setempat, serta hilangnya perlindungan terhadap biodiversitas lokal (Aulia et al. 2023).

Indonesia sebagai negara berkembang dewasa ini perlu berbenah terkait pengelolaan lingkungan hidup yang akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Rochmayanto dkk dalam *policy brief* berjudul “*Pengarus-utamaan Biaya Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dalam Pembangunan*” merekomendasikan urgensi munculnya adaptasi hijau dari, oleh, dan dengan masyarakat yang difasilitasi secara finansial dan motivasi oleh pemerintah. *Green adaptation* merupakan gerakan masyarakat lokal untuk mengembalikan kembali fungsi lingkungan melalui aktivitas penghijauan dan konservasi biodiversitas. Acuan ini berdasarkan hasil studi Rochmayanto dkk memiliki efektivitas resiliensi masyarakat yang

lebih tinggi dari pada aksi teknis sipil (proyek *top-down* pemerintah) dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Kertas kebijakan berbasis penelitian terukur dan penghitungan sistematis milik Rochmayanto dkk menunjukkan bahwa proyeksi kerugian setelah tindakan adaptasi akan lebih menurun dari pada angka kerugian tanpa adanya adaptasi lokal. Pelibatan masyarakat lokal dalam sebuah program pengembangan masyarakat jauh lebih efektif memberikan dampak perubahan dan kesejahteraan masyarakat dari pada program konservasi lingkungan dari pemerintah yang dijalankan secara sepihak. Namun Rochmayanto mengingatkan, bahwa adaptasi masyarakat tersebut tidak bisa dijalankan secara mandiri oleh masyarakat tanpa peranan pemerintah lokal. Melalui penelitian yang telah ia lakukan, Rochmayanto merekomendasikan kehadiran pemerintah lokal dengan memfasilitasi upaya adaptasi tersebut secara keseluruhan dan partisipatif (Rochmayanto et al. 2014).

Sejumlah pustaka terdahulu di atas menyimpulkan bahwa konservasi lingkungan telah memperoleh atensi yang cukup besar baik di negara berkembang maupun negara maju. Konservasi lingkungan dinilai perlu dipandang menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dengan program pembangunan sehingga perlu dijalankan secara terukur berbasis kajian saintifik (Gupta 2021; Magdalena et al. 2023). Penerapan konservasi lingkungan di ranah lokal, penting untuk memperhatikan kesadaran dan partisipasi lokal dalam rangka mendesain program pembangunan yang berkelanjutan (Alberts et al. 2024). Kesadaran dan partisipasi tersebut tentunya juga harus menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kemiskinan yang menjadi problem umum masyarakat peKalurahan atau pinggiran maka konservasi dapat dihubungkan dengan perluasan mata pencaharian mereka (Gidebo 2023). Namun perlu menjadi catatan penting, bahwa kesadaran dan partisipasi tersebut tidak dapat diberikan secara eksklusif tanpa kontrol atau pengawasan tertentu sebab kapasitas masyarakat tidak selalu mumpuni untuk menjalankan konservasi (Soltau 2015) bahkan sebagian cenderung destruktif terhadap lingkungan (Medeiros et al. 2023). Pemerintah tetap berada di balik layar untuk

memfasilitasi adaptasi masyarakat (Teller 2016), sementara masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan (Case et al. 2015; Sullivan et al. 2019).

Dunia internasional selanjutnya mengkonsep program *Integrated Conservation and Development Projects* (ICDPs) sebagai nobel pemikiran yang mengawinkan antara aksi konservasi dan pengembangan masyarakat. ICDPs didesain sebagai *win-win solution* antara kepentingan pelestarian alam dan lingkungan dengan proteksi kesejahteraan manusia dalam aspek sosio-ekonomi dan sekuritas (Menzies 2006; Mufune 2015). Implementasi ICDPs di sejumlah negara maju diprioritaskan untuk berorientasi pada kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal baik dari masyarakat secara langsung maupun organisasi yang menjadi wadah masyarakat (Bergh 2015). Sayangnya di sejumlah negara berkembang ICDPs justru menjadi proyek gagal sebab tidak sinkronnya orientasi dan visi masyarakat dengan pemerintah (Pratiwi et al. 2022; Tafon et al. 2015), konflik manusia-lingkungan di ranah lokal yang belum teratasi (Silwal et al. 2022), inkonsistensi pemerintah untuk terus hadir kebersamaan pengembangan masyarakat (Cagalanan 2018; J. Chambers et al. 2020). Di Indonesia sendiri, konsep konservasi lingkungan seringkali masih dianggap terpisah dengan proses pembangunan sehingga banyak mengorbankan kearifan lingkungan dan masyarakat (Aulia et al. 2023; Sloan et al. 2019). Studi terbaru di Indonesia menganjurkan untuk melaksanakan adaptasi hijau yang dilaksanakan oleh masyarakat namun difasilitasi secara keseluruhan (finansial, lisensi, dan kolaborasi) oleh masyarakat. Adaptasi hijau dinilai lebih efektif dari pada program konservasi lingkungan dengan model tindakan sipil teknis (Rochmayanto 2014).

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, terdapat *gap of literature* yang jelas terpetakan secara simultan. Konservasi lingkungan belum dinalisa secara akumulatif dari aspek pengembangan masyarakat serta perspektif etika lingkungan. Diskursus konservasi lingkungan dan pembangunan di ranah internasional masih berkuat pada implementasi program negara yang disodorkan kepada masyarakat, sementara itu di Indonesia pembangunan masih

dilakukan tanpa adanya orientasi konservasi. Para peneliti terdahulu yang berfokus pada disiplin konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat berdasarkan akumulasi penelitian terdahulu belum menemukan kombinasi gerakan akar rumput pengembangan masyarakat untuk konservasi lingkungan. Studi terkait giat sosial-ekologis Komunitas Resan selanjutnya penting untuk dilakukan dalam rangka menambal celah literatur tersebut. Pada konteks ini, tinjauan pengembangan masyarakat diperlukan untuk menganalisa bagaimana kearifan lokal dan partisipasi masyarakat ditransformasi sebagai instrumen pembangunan untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat (*by, with, and for the people*). Integrasi kearifan lokal sebagai instrumen pengembangan masyarakat akan mendukung munculnya pembangunan berkelanjutan serta metode dinamis yang fleksibel bagi masyarakat ketika menghadapi permasalahan seperti sosial-ekologis (Chaiphar et al. 2013). Sementara etika lingkungan, akan menjadi basis normatif untuk menganalisa aksi konservasi tersebut.

E. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan topik yang diangkat dalam penelitian ini, teori tentang pengembangan masyarakat akan digunakan sebagai dasar untuk untuk meninjau konteks *community based conservation*. Basis teori dalam kajian ini akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara lebih dalam tahapan pendekatan konservasi lingkungan berbasis komunitas. Pengantar teori pengembangan masyarakat akan menjadi kerangka berpikir peneliti untuk menyusun hasil penelitian yang ditemukan selama proses penelitian. Teori pengembangan masyarakat dipilih sebab berdasarkan pengamatan awal, peneliti menemukan program pengembangan masyarakat yang terbangun secara organis yang memposisikan Komunitas Resan sebagai fasilitator dan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan. Aktivitas pendampingan Komunitas Resan terhadap masyarakat lokal dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan melalui kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat merupakan aspek fundamental dalam disiplin

pengembangan masyarakat. Beberapa alasan tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam penggunaan teori pengembangan masyarakat pada studi ini.

Untuk memperdalam kajian terkait konservasi lingkungan, teori tentang etika lingkungan akan digunakan sebagai sandaran normatif dari giat sosial-ekologis Komunitas Resan bersama masyarakat. Teori etika lingkungan akan memungkinkan peneliti untuk mengkonfigurasi bagaimana bentuk konservasi lingkungan berbasis komunitas yang dilakukan baik oleh Komunitas Resan maupun masyarakat Gunungkidul. Melalui basis teori pada kajian ini, hasil penelitian dapat diidentifikasi kesesuaiannya dengan teori, jika ada kebaruan apa saja yang ditemukan, karakteristik etika lingkungan, dan analisis penalaran secara lebih mendalam yang lain.

1. Pengembangan Masyarakat dalam Konservasi atau Community Based Conservation

“Conservation should be carried out by, with, and for the people”. Pernyataan berikut merupakan anti-tesis dari program konservasi di Barat yang awalnya cenderung melawan atau menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Sejarah mencatat bahwa program konservasi meski memiliki visi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati namun di sisi lain justru menumbalkan masyarakat lokal khususnya masyarakat miskin. Pasalnya, konservasi di awal masa kemunculannya dilakukan dengan cara mengusir masyarakat dari tanah adat ke tempat lain hanya untuk memberi tempat bagi ‘alam’. Dampak yang dihasilkan dari metode tersebut meskipun memberikan manfaat secara nyata terhadap alam namun juga membutuhkan biaya yang cukup besar terutama untuk masyarakat yang digusur. Program konservasi pada evaluasi selanjutnya ternyata juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap alam sebab tidak ada subjek lokal atau *local heroes* yang secara berkelanjutan meneruskan program konservasi. Dunia internasional akhirnya sepakat bahwa suatu program konservasi akan gagal apabila tidak

melibatkan masyarakat lokal khususnya pada aspek hak berpendapat, pengelolaan lingkungan secara kolaboratif, dan pembagian manfaat bagi masyarakat lokal (Schmidt-Soltau 2015).

Tesis mengenai konservasi berbasis masyarakat (*community based conservation*) di atas merupakan pernyataan yang cukup relevan dengan disiplin ilmu pengembangan masyarakat yang memang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Keyakinan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Amartya Sen dalam “*Development of Freedom*” bahwa masyarakat perlu diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam urusan pengembangan dirinya sendiri atau *independency centered people* (Sen 1999). Kemerdekaan masyarakat tersebut perlu diberikan secara terbuka sebab masyarakat lokal adalah orang-orang yang paling mengerti kondisi lingkungan di sekitarnya dan memahami bagaimana cara menjaga lingkungan dan cara lingkungan bekerja (Nusyirwan 1995). Lebih dari itu, konsep *community based conservation* juga selaras dengan konsep pengembangan masyarakat menurut Robert Chambers yaitu upaya pembangunan di masyarakat yang mencakup nilai dan norma dalam kehidupan sehingga dapat menumbuhkan paradigma masyarakat yang bersifat partisipatif, deliberatif, desentralisasi, serta berkelanjutan (Chambers 1995).

Community based conservation (CBC) sendiri adalah suatu konsep tentang proses gerakan konservasi yang melibatkan partisipasi komunitas lokal dalam upaya perlindungan dan manajemen biodiversitas. Gerakan menggabungkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi ini telah diproklamirkan sejak tahun 1980. Konsep CBC berangkat dari gagasan bahwa alam dan budaya memiliki koneksi yang erat, serta budaya memiliki pola pemahaman unik yang berharga untuk pengelolaan ekologi. CBC ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proses konservasi lingkungan dengan menempatkan komunitas lokal sebagai subjek pembangunan dan *decision-maker* atau pembuat keputusan (Teampanpong et al. 2024). Konsep penyelamatan lingkungan selanjutnya berkembang menjadi konsep keadilan

lingkungan atau *environment justice* yakni pengembangan mata pencaharian masyarakat di area konservatif dan angka kemiskinan yang tinggi (Reisland 2013).

Di samping karena lemahnya penanganan negara dalam program konservasi, CBC juga berangkat dari argumen pos-equilibrium yakni *new ecology*. Ekologi baru lahir di awal abad ke 20 dengan argumen utama bahwa gangguan yang diberikan manusia di sekitar area konservasi/lingkungan tertentu penting untuk mendukung biodiversitas di lingkungan alaminya sebab terdapat sejarah hubungan yang panjang antara manusia dengan lingkungan (Reisland 2013). Manusia secara alamiah mempelajari bagaimana alam bekerja, selanjutnya turut berkontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan biodiversitas yang hidup di sekitarnya. Sejarah panjang dua entitas yang hidup berdampingan ini secara organik akan menimbulkan keseimbangan lingkungan sebagai ekspektasi konservasi itu sendiri. Pemikiran ini berkembang dari temuan bahwa sejumlah area murni di alam telah dimodifikasi atau terkena sentuhan manusia di zaman dahulu (Meyer and Börner 2022). Maka dari itu, pemisahan atau dikotomi antara manusia dan lingkungan adalah tindakan yang kurang tepat, sebab di satu sisi juga dapat meningkatkan permasalahan lingkungan lain serta kerentanan lingkungan itu sendiri (van den Bergh 2015).

Gagasan pokok dalam CBC adalah “apabila masyarakat memperoleh manfaat dari suatu wilayah lingkungan yang mereka kelola, maka secara natural mereka akan berperan penting dalam mendukung upaya konservasi” (Berkes 2007). Komunitas lokal atau penduduk di sekitar lingkungan lebih banyak melakukan investasi dalam penggunaan sumber daya berkelanjutan dibandingkan entitas yang lebih besar seperti perusahaan tertentu yang kurang memberikan timbal balik positif pada lingkungan (Mufune 2015). Masyarakat sekitar dinilai memiliki pengetahuan yang lebih kompleks terhadap proses alam di sekitar, dan oleh sebab itu mereka tahu bagaimana cara mengelola wilayahnya sendiri. Namun titik temu yang diinginkan dalam konteks ini adalah adanya pertemuan antara nilai-nilai masyarakat lokal yang

berinteraksi secara langsung dengan alam dengan tujuan para konservasionis (Case et al. 2015; Silwal et al. 2022). Maksudnya, program konservasi yang dicanangkan dari luar wilayah (ranah eksternal seperti pemerintah, LSM, dll) diproyeksikan akan lebih berhasil ketika pengambilan kebijakan disesuaikan dengan kegiatan dan pemahaman lokal yang telah memiliki fungsi konservasi.

CBC telah menjadi konsep yang digunakan oleh sebagian pihak seperti LSM, perusahaan, koperasi, dan komunitas dengan bergerak di akar rumput untuk strategi adaptasi perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Komunitas lokal berperan penting dalam rangka mengurangi dampak dari perubahan iklim yang terjadi serta beradaptasi dengan tren jangka panjang yang diakibatkan olehnya melalui pengelolaan sumber daya alam yang efektif, penguatan pengetahuan dan kesiapan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan iklim, serta memberikan wacana baru dalam konservasi berbasis masyarakat. Sharma dalam *systematic literature review* miliknya menemukan bahwa komunitas lokal memegang peran penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan pada suatu proyek konservasi berbasis masyarakat di tingkat mikro dan mezzo (Sharma 2023). Setiap komunitas lokal memiliki strategi atau pendekatan masing-masing yang menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang didampingi dalam menangani dampak perubahan iklim pada lingkungan.

Berkaitan dengan strategi tersebut, pada kajian pengembangan masyarakat, strategi dapat dikaji melalui beragam teori. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto merumuskan trikotomi strategi pemberdayaan masyarakat yaitu penyadaran, pengkapasitan, dan pendayaan. Pada aspek penyadaran, masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan diberikan penyadaran terkait apa yang menjadi permasalahan dan apa potensi yang mereka miliki. Penyadaran dapat dilakukan oleh bagian dari masyarakat itu sendiri atau dibantu oleh komunitas lokal yang berperan sebagai fasilitator. Pada tahap penyadaran, pihak yang menyadarkan sebenarnya hanya diingatkan tentang apa konteks permasalahan yang mereka

hadapi serta aset apa yang mereka dapat kembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Strategi ini meskipun terlihat sederhana namun memiliki dampak yang cukup signifikan pada proses pemberdayaan selanjutnya. Pasalnya, seringkali masyarakat tidak sadar dengan kondisi mereka secara pribadi maupun komunal. Penyadaran penting untuk mengingatkan masyarakat atas apa yang seharusnya mereka lakukan untuk diri sendiri.

Adapun pengkapasitasan berarti peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola aset yang dimiliki, beranjak dari keterpurukan, dan menyelesaikan permasalahan. Pengkapasitasan juga dapat diartikan sebagai upaya memampukan masyarakat baik secara individu maupun kelompok pada suatu diskursus tertentu. Pengkapasitasan juga sering dikenal dengan istilah *capacity building*. Sebagai subjek pembangunan, masyarakat harus dibekali dengan kapasitas pengetahuan dan keterampilan tertentu supaya dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri atau swadaya. Tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan, masyarakat tidak akan memiliki orientasi pembangunan serta terjebak dalam aktivisme buta. Bekal pengetahuan dan keterampilan ini dapat menjadi suatu harmoni yang penting apabila nantinya masyarakat dapat mensinergikan dengan konsep kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang telah dimiliki sebelumnya secara endemik.

Sementara itu, pendayaan berarti memberikan daya kepada masyarakat yang telah sadar dan memiliki kapasitas untuk mandiri. Daya yang dimaksud dapat berupa otoritas, kemandirian, dan peluang untuk mencapai kesejahteraan yang diimpikan. Berkaitan dengan strategi pendayaan, maka kapasitas komunitas lokal yang berperan sebagai fasilitator akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kapasitas daya yang diberikan kepada masyarakat. Maka dari itu, suatu proyek pemberdayaan perlu diiringi dengan perluasan jaringan dan koneksi dalam rangka untuk memperbesar dampak dari pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Wahyuni 2018).

2. Green Social Ethic atau Etika Lingkungan

Etika lingkungan secara fundamental menempatkan aspek keseimbangan pada kehidupan manusia melalui hubungan dan interdependensi kepada lingkungan hidup yang meliputi unsur abiotik, biotik, atau komponen alam non manusia. Nilai keseimbangan tersebut diciptakan supaya manusia secara sadar dan paham untuk memegang peran kunci dalam melestarikan atau konservasi lingkungan dengan karakteristik berkelanjutan. Etika lingkungan sebagai disiplin ilmu yang cenderung masih baru hadir untuk memberikan kesadaran bagi manusia untuk bertanggungjawab atas apa yang telah mereka perbuat melalui upaya dan penghargaan terukur terhadap lingkungan hidup. Sebagai satu-satunya subjek hidup yang memiliki akal, pikiran, dan logika, manusia menjadi satu-satunya elemen paling diharapkan untuk menjaga kearifan lingkungan yang sehat. Adapun istilah lingkungan yang sehat secara ekologis memiliki makna lingkungan yang memiliki daya dukung atau fungsi lingkungan yang berkontribusi baik kepada makhluk hidup lain yang ada di sekitarnya yang bergantung pada lingkungan yang sehat itu (Marfai 2013).

Ilmuan dunia dari multi-disiplin mulai terstimulan untuk mempelajari dan merumuskan etika lingkungan sejak seorang sejarawan dari Universitas California, Lynn White, mempublikasikan artikelnya yang berjudul "*The Historical Roots of Our Ecological Crisis*" di Jurnal Science pada tahun 1969. Pada artikel tersebut, White merasa bahwa peradaban manusia dengan teknologi terbaru dan ilmu pengetahuan telah merubah paradigma hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Peradaban yang telah dimulai sejak abad ke 17 atau 18 tersebut telah menggeser paradigma "manusia adalah bagian dari alam" menjadi "manusia dan alam" atau "manusia menguasai alam". Pergeseran paradigma menurut White sangat berperan pada krisis ekologi yang terjadi pada abad tersebut sebab manusia mulai berpikir bahwa mereka adalah makhluk yang tidak terintegrasi dengan alam. Manusia memiliki kepentingannya sendiri begitu pula dengan alam. Berangkat dari landasan ideologis yang mulai memisahkan antara

manusia dan lingkungan tersebut, aktivitas manusia semakin menunjukkan dominasinya terhadap alam sehingga secara terus menerus melakukan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Manusia dengan karakter dominannya terhadap lingkungan telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan manusia di masa depan yakni fenomena krisis ekologi yang menakutkan (Nusyirwan 1995).

Pernyataan yang cukup fenomenal dari artikel White adalah “Apa yang manusia perbuat terhadap lingkungan alamnya tergantung dari apa yang manusia pikirkan terhadapnya dan hubungan dirinya dengan berbagai komponen alam lain di sekitarnya”. Pernyataan tersebut menjadi aspek filosofis yang selanjutnya menjadi dasar moral etika lingkungan yang membahas hubungan manusia dan lingkungan. Lingkungan alam yang terlihat baik menunjukkan pengelolaan lingkungan oleh manusia yang juga baik, begitupula sebaliknya. Namun meskipun tulisan White cukup memperoleh apresiasi yang dahsyat dari kalangan akademisi, pernyataan White juga dianggap terlalu simplifikasi terhadap pemahaman religiusitas masyarakat di barat. Pasalnya pada artikel miliknya, White menghubungkan antara sistem sosial, krisis ekologi, dan religiusitas masyarakat yang menurutnya memiliki relevansi yang linear (Marfai 2013).

Pemikiran lain yang menstimulasi kemunculan etika lingkungan adalah tesis milik Garrett Hardin dalam artikel berjudul “*The Tragedy of The Common*” pada tahun 1968 yang membahas terkait permasalahan populasi manusia dan termasuk di dalamnya juga membahas terkait krisis ekologi. Hardin menyatakan bahwa “*The population problem has no technical solution, it requires a fundamental extension in morality*” atau dalam arti bahwa permasalahan manusia saat ini sudah tidak dapat diselesaikan hanya dengan tataran teknis semata, namun perlu adanya pengembangan paradigma yang dapat dibenarkan dan menjadi bangunan moral bagi manusia. Pernyataan ini muncul dari kritik Hardin kepada fenomena pemberian solusi oleh kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang justru hanya mengembangkan kedua

unsur tersebut namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan moralitas masyarakat (Borrong 1999).

Melalui pemikiran Hardin, etika lingkungan dipromosikan sebagai disiplin ilmu agar manusia mulai merefleksikan kembali bahwa manusia merupakan bagian yang integral dengan alam, bahkan sejatinya manusia yang lebih membutuhkan terhadap lingkungan alamnya secara fisik. Kenyataan tersebut perlu membuat manusia sadar bahwa mereka perlu memaknai hubungan manusia dengan lingkungan sebagai moralitas tersendiri sehingga manusia akan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan terhadap lingkungan salah satunya melalui upaya konservasi. Di samping itu melalui pemikiran White, manusia perlu menghayati secara holistik terkait pengertian lingkungan dan tindakan baik terhadap lingkungan (Mu'tasim 1994). Pendekatan etika lingkungan diekspektasikan dapat mendorong manusia untuk berpikir lebih jernih dengan akal budi serta hati nurani tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap pada lingkungan yang telah menjadi tempat di mana manusia hidup.

Diskursus terkait etika lingkungan semakin berkembang setelah masifnya kontribusi dari para pemerhati lingkungan serta para filosof. Salah satu kontribusi yang cukup penting dalam etika lingkungan pada tataran filosofis adalah kategorisasi pendekatan manusia terhadap lingkungan dalam rangka konservasi oleh Hin (2002). Ketiga pendekatan tersebut adalah meliputi pendekatan instrumental, pendekatan aksiologis, dan pendekatan antropologis. Pertama, pendekatan instrumental atau *instrumental approach*. Paradigma dasar dalam pendekatan ini adalah upaya peningkatan hubungan antara manusia dengan lingkungan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan dasar material manusia. Artinya, manusia akan melakukan proteksi, konservasi, maupun hal-hal baik lain terhadap lingkungan namun semua itu dilakukan demi menunjang kebutuhan manusiawi secara materiil yang ada pada lingkungan. Pendekatan ini jika dianalisa lebih jauh memang sesuai dengan logika bahwa manusia pada dasarnya memang butuh terhadap sumber daya yang ada di alam. Namun

sejumlah filsuf dan pemerhati lingkungan banyak yang kurang setuju terhadap pendekatan ini sebab cenderung menjadikan manfaat yang terdapat pada lingkungan sebagai alasan untuk melakukan hal baik terhadapnya. Maka apabila manfaat tersebut sudah tidak tersedia atau tidak lagi memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan manusia maka upaya konservasi juga tidak akan berlanjut. Adapun *axiological approach* merupakan kontradiksi dari pendekatan instrumental. Pendekatan aksiologis ini menekankan pada penyelamatan terhadap krisis ekologi perlu manusia lakukan sebab alam pada dasarnya memiliki nilainya sendiri. Taylor mengistilahkan pendekatan ini dengan “*ethics of respect for nature*” atau etika kehormatan untuk alam. Artinya sebab nilai yang dikandung oleh setiap komponen alam tersebut, manusia perlu menyelamatkan alam dari krisis yang terjadi. Terakhir, pendekatan ekosentris lebih fokus keseimbangan alam, di mana manusia dan alam dianggap sebagai satu kesatuan ekosistem. Pendekatan ekosentris menegaskan bahwa kedekatan manusia dan alam dapat terwujud apabila manusia dapat merasakan nilai-nilai dasar yang terdapat pada komponen alam (Hin 2002).

Perbedaan kunci pada ketiga pendekatan tersebut di atas adalah pada internalisasi nilai pada masing-masing model. Pendekatan instrumental memiliki nilai kadar egosentris manusia yang lebih tinggi dari pada pendekatan yang lain. Sementara itu, pendekatan aksiologis lebih condong pada nilai orientasi lingkungan yang perlu dihargai sehingga manusia harus berbuat baik padanya. Adapun pendekatan antropologis lebih bersifat seimbang sebab secara konseptual mengakui nilai-nilai kemanusiaan namun juga tidak menafikan nilai-nilai alam. Manusia sebagai pihak yang berada di tengah nilai-nilai tersebut perlu secara simultan menghargai keduanya. Pada setiap manusia, terdapat nilai-nilai yang variatif dalam konteks pandangannya terhadap alam. Nilai tersebut yang berkembang dan bertransformasi menjadi paham-paham baru dalam disiplin etika lingkungan. Menurut (Marfai 2013), etika lingkungan telah berkembang dibuktikan dengan munculnya dua paham baru yaitu *deep ecology* dan *social ecology*.

Deep ecology memiliki semangat bahwa manusia merupakan bagian yang integral atau satu kesatuan dengan alam. Paham ini muncul atas keresahan sebagian besar manusia yang merasa terpisah dengan alam. Pemahaman ini memiliki tiga elemen penting yang berperan penting di dalamnya yaitu rasa, spiritualitas, dan aksi. Rasa berarti manusia perlu merasakan apa yang terjadi pada alam sebagai apa yang juga terjadi pada dirinya sendiri, atau dalam kata lain *sense of belonging*. Jika lingkungan mengalami krisis maka manusia perlu merasakannya dan berpikir bagaimana bangkit dari krisis. Sementara spiritualitas berarti manusia menjadikan lingkungan alam sebagai sesuatu yang jauh lebih luas dan besar dari manusia dan manusia menyatu sebagai ruh di dalamnya. Artinya, *deep ecology* merupakan pemahaman etika lingkungan yang holistik sebab mengintegrasikan pemikiran, perasaan, dan spiritualitas manusia pada krisis ekologi sehingga bermanifestasi pada wujud aksi nyata (Keraf 2005).

Social ecology merupakan respon radikal untuk memberikan sikap terhadap krisis ekologi yang terjadi akibat situasi sosial-politik dan kapitalisme global. Paham ini beranggapan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah produk kapitalisme. Dominasi manusia terhadap manusia lain telah mengembangkan pola pikir dan pola tindak manusia yang cenderung merusak terhadap alam. Analogi sederhananya adalah ketika terjadi persaingan antara raksasa bisnis global yang saling sikut untuk menjadi yang lebih besar di antara yang lain sementara itu mereka tidak memikirkan apa yang telah mereka perbuat pada lingkungan sekitar. Paham ini selanjutnya menjadi antitesa dari carut marut tersebut dengan kritik serta revitalisasi/rekonstruksi ekologi secara komunal melalui pendekatan etik kepada masyarakat atau komunitas tertentu (Borrong 1999).

Demikian, etika lingkungan merupakan sebuah disiplin ilmu yang implementasinya menekankan pada internalisasi nilai dan norma baru di masyarakat. Etika lingkungan akan lebih mudah dipraktikkan ketika masyarakat atau komunitas tertentu telah sadar atas apa yang terjadi pada lingkungan mereka, atau sadar pada bagaimana seharusnya mereka beretika pada

lingkungan. Meskipun disiplin ilmu baru ini bersifat inklusif dengan terbuka pada seluruh kajian multi-disipliner, namun poin krusial pada disiplin ini adalah kesadaran masyarakat tersebut di atas. Setiap pembahasan yang lebih rinci, detail, dan ilmiah tidak akan memberikan dampak apapun apabila secara ontologis masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap posisinya dengan lingkungan sekitarnya (Carm 1989). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka perspektif etika lingkungan secara spesifik pada aspek konservasi akan sangat relevan dengan konsep pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kondisi tertentu.

Terlepas dari sejumlah pembahasan di atas, Indonesia secara genealogis telah memiliki etika lingkungan yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya masyarakat tradisional. Etika lingkungan di Indonesia muncul sebagai hasil dari proses interaksi manusia dan lingkungan yakni kebijakan/kearifan lokal dalam bentuk pengetahuan, norma adat, mitos, aktivitas, budaya, peralatan tertentu. Pola adaptasi dalam bentuk kearifan lokal inilah yang diturunkan dari generasi ke generasi yang membentuk peraturan tidak tertulis dalam konteks pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan batasan-batasan tertentu yang mengikat masyarakat. Pada konteks kearifan lokal tersebut suatu upaya konservasi lingkungan dapat ditumbuhkan pada diri masyarakat dalam bentuk kesadaran sosial. Adapun beberapa pendekatan yang dapat ditempuh untuk menanamkan bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah *human ecology welfare* dan politik ekologi (Marfai 2013).

Eckersley menekankan dalam pendekatan *human ecology welfare* bahwa pendekatan ini dapat dilakukan apabila terdapat keadilan lingkungan terutama jaminan kesejahteraan masyarakat. Penekanan ini selaras dengan argumen Gidebo bahwa masyarakat akan melakukan konservasi lingkungan apabila konservasi dikaitkan pada peningkatan mata pencaharian serta kesejahteraan mereka (Gidebo 2023). Eckersley menjelaskan bahwa pendekatan ini dapat

tumbuh dengan pengembangan atau penyesuaian perundangan yang mengatur kewenangan masyarakat lokal untuk pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan penguatan institusi lokal dan petani. Institusi lokal seperti contoh Komunitas Resan yang menjadi subjek penelitian dalam studi ini perlu memperoleh kewenangan secara politis dan akses terhadap sumber daya alam untuk mengembangkan konservasi lingkungan di Gunungkidul.

Sementara itu, pendekatan politik ekologi menurut Setiawan lebih menekankan pada kajian kausalitas perubahan lingkungan yang lebih kompleks tidak sekedar urusan fisik lingkungan yakni pembagian kekuasaan pada suatu komunitas/masyarakat tertentu. Pendekatan ini menjadikan hak untuk lingkungan dan keadilan lingkungan sebagai tolok ukur yang perlu dicapai terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud sebagai hak adalah hal yang merujuk pada standar kebutuhan individu terhadap objek materil lingkungan seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Hak-hak ini harus diatur secara adil dan partisipatif dalam alokasi kepemilikan dan pengelolaan lingkungan tertentu pada isu-isu relasional baik antar individu terutama antar kelompok (Keraf 2005).

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Pemilihan metode kualitatif dilakukan sebab metode ini menekankan pemaknaan komprehensif pada serangkaian peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Serangkaian peristiwa yang memunculkan konservasi lingkungan berbasis komunitas dalam pengembangan masyarakat di Gunungkidul begitu juga tipe etika lingkungannya, menjadi fokus penelitian inti yang diteliti untuk memperoleh kedalaman makna menggunakan metode kualitatif ini. Metode kualitatif memberikan ruang alternatif yang lebih terbuka untuk melakukan pemaknaan atas dimensi motif dan konteks terhadap dimensi proses serangkaian fenomena yang terjadi. Sejumlah fenomena tersebut selanjutnya perlu dianalisis untuk

membentuk pemahaman yang kompleks sehingga penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini semakin memiliki relevansi untuk mengungkap kedalaman makna atas tindakan sejumlah tokoh dan peran yang berkembang di masyarakat dalam konteks konservasi lingkungan berbasis komunitas (Miles, et. al. 2014).

Subjek dalam penelitian ini adalah para aktor sosial yang meliputi sejumlah orang dalam Komunitas Resan Gunungkidul serta beberapa golongan masyarakat dari lokasi yang dipilih. Pemilihan sejumlah orang sebagai informan dalam Komunitas Resan cenderung unik sebab tidak bisa ditentukan berdasarkan struktur organisasi atau struktur kepemimpinan. Komunitas Resan berdiri dan beroperasi tanpa adanya legalitas dan struktur kelembagaan yang mengikat, mereka secara organik melakukan aksi giat sosial-ekologis sebab keresahan yang sama atas perubahan fungsi lingkungan yang berdampak pada penderitaan masyarakat. Namun meskipun demikian, tidak semua anggota komunitas memiliki posisi atau kedudukan yang sama. Terdapat sejumlah aktor kunci yang walaupun tidak memiliki struktur sosial/organisasi tertentu terlihat memiliki kekuatan sosial untuk melakukan persuasi, mobilisasi, dan integrasi-kolaborasi pada setiap kegiatan maupun kebijakan tertentu. Sejumlah aktor ini adalah para figur yang dianggap memiliki pengaruh paling besar, perkataannya diikuti, dan perilakunya ditiru. Begitu pula dengan masyarakat yang menjadi subjek utama konservasi lingkungan dalam pengembangan masyarakat, hanya sebagian kecil dari mereka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Pemilihan sejumlah masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan relasi kuasa yang tercipta di antara masyarakat dan tingkat pengaruhnya pada program. Beberapa informan masyarakat tersebut di antaranya adalah sejumlah ketua karang taruna dan tokoh masyarakat atau *kaum* atau juru kunci yang berpartisipasi dalam program. Melalui proses pemilihan subjek penelitian atau informan seperti ini, serangkaian fenomena yang menjadi fokus penelitian akan lebih mudah untuk ditelusuri secara komprehensif atau holistik (Miles, et. al. 2014)

Penelitian ini dapat dikatakan pula menggunakan tipe penelitian deskriptif, yakni tipe penelitian yang menyajikan deskripsi atau uraian terhadap sebuah fenomena kolektif dalam masyarakat. Penelitian deskriptif akan melihat bagaimana suatu fenomena dapat terjadi di masyarakat tertentu berdasarkan kesadaran lokal atas realitas yang terjadi. Peranan Komunitas Resan dalam giat sosial-ekologis di Gunungkidul serta partisipasi masyarakat untuk melakukan konservasi lingkungan merupakan serangkaian peristiwa yang akan dideskripsikan. Penelitian deskriptif akan memudahkan penulis untuk menggambarkan secara lebih terperinci terkait realitas sosial yang terjadi dengan kompleks sehingga interpretasi terhadap fenomena akan diperoleh.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan gambaran deskriptif pengalaman dan pemahaman para informan dalam eksplorasi konservasi lingkungan berbasis komunitas di Kabupaten Gunungkidul. Eksplorasi ini mengangkat satu lokasi penelitian utama di Kabupaten Gunungkidul sebagai batasan penelitian untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan. Peneliti tidak tinggal di dalam masyarakat namun mengamati pola dan perilaku Komunitas Resan dan masyarakat lokal dalam sejumlah kegiatan yang relevan dengan topik konservasi lingkungan berbasis komunitas. Peneliti berpartisipasi secara pasif dalam beberapa forum diskusi baik yang bersifat formal maupun non-formal serta beberapa aksi giat sosial-ekologis di lokasi penelitian. Observasi partisipatif dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 5 bulan terhitung sejak tanggal Minggu, 17 Agustus 2024 dan berakhir pada pertengahan Januari 2025. Menggunakan metode observasi partisipatif, peneliti melakukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan dan didiskusikan oleh Komunitas Resan

Gunungkidul dengan masyarakat lokal dengan cara mendengarkan apa yang mereka ucapkan, menyaksikan apa yang mereka lakukan, serta mengamati diskusi mereka via grup *whatsapp*.

Pada grup *whatsapp* bernama Komunitas Resan GK, terdapat sejumlah pihak yang terhimpun meliputi anggota komunitas, beberapa representasi masyarakat seperti karang taruna, kepala dukuh, dan aktivis sosial-ekologis, beberapa perwakilan kedinasan yang bergabung secara sukarela seperti Dinas BKLH, Pamsimas, dll. Adapun pembahasan dalam grup tersebut adalah seputar informasi terbaru terkait pelaksanaan kegiatan, *update* perkembangan lingkungan yang telah dilakukan upaya konservasi, serta diskusi interaktif topik-topik mengenai konservasi lingkungan, perubahan iklim, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Teknik observasi dipilih peneliti sebab dianggap lebih memfasilitasi peneliti dalam mengkonfigurasi data lapangan menjadi data penelitian. Sementara itu jenis observasi partisipatif dipilih agar peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara langsung sekaligus berinteraksi dengan subjek penelitiannya (Hasanah 2017). Data yang diperoleh melalui observasi partisipatif dicatat melalui catatan lapangan dalam bentuk rekaman, teks digital maupun non-digital ucapan, serta potret beberapa peristiwa dan informasi penting yang relevan dengan topik penelitian. Catatan lapangan ini penting untuk memberikan panduan kepada peneliti terkait bagaimana pola peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti itu terjadi.

Setelah memperoleh gambaran empiris terkait peristiwa yang terjadi di lapangan melalui observasi partisipatif, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur kepada sejumlah informan untuk mengkonfirmasi data empiris serta memperoleh penjelasan lebih elaboratif akan fenomena konservasi lingkungan berbasis komunitas. Pada wawancara semi-terstruktur, peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dasar dalam rangka mengkritisi fenomena konservasi lingkungan berbasis komunitas, namun pertanyaan lanjutan dan pengungkapan pertanyaan secara fleksibel dapat berkembang tergantung dari keunikan temuan yang diperoleh dari informan. Beberapa informan yang dipilih terdiri dari tiga kategori yaitu anggota

Komunitas Resan, masyarakat lokal (juru kunci dan komunitas lokal), pemerintah lokal (kepala dukuh), dan akademisi yang juga melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung dalam proses konservasi lingkungan berbasis komunitas. Pada penelitian ini, semua narasumber akan dianonimkan dalam rangka menghindari konflik kepentingan antar narasumber dan menjaga etika penelitian. Adapun profil lengkap para narasumber akan dijelaskan melalui tabel 1 di bawah. Wawancara dilakukan dengan dua teknik yaitu secara tatap muka langsung dan melalui aplikasi komunikasi digital *whatsapp*. Data hasil wawancara selanjutnya ditranskripsikan menjadi verbatim wawancara sehingga lebih memudahkan peneliti untuk menginterpretasi pengalaman dan pengamatan para informan yang terlibat dalam program.

Terakhir, dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data dengan tujuan memperkaya data primer. Beberapa dokumen yang dikumpulkan sebagai data sekunder di antaranya adalah berita-berita dan artikel di laman digital, basis data Kabupaten Gunungkidul, serta informasi terbaru dari media sosial. Manfaat data hasil dokumentasi ini berfungsi untuk memperkaya kelengkapan data serta memberi penajaman pemahaman terhadap peristiwa yang diteliti sehingga dapat melihat fenomena dalam lanskap yang utuh. Memadukan data primer dan data sekunder dalam penelitian akan memfasilitasi peneliti untuk memiliki pemahaman yang jelas dan objektif tentang suatu peristiwa sehingga lebih mudah untuk menganalisa fenomena dan mengambil interpretasi (Al-Manshur 2012).

Tabel 1: Profil Narasumber						
No.	Kode Narasumber	Profil	Gender	Usia	Durasi Wawancara	Tanggal Wawancara
1.	EP44	Komunitas Resan	Pria	44	93 Menit	24/10/2024
2.	AR27	Komunitas Resan	Pria	27	42 Menit	03/11/2024
3.	SP23	Relawan	Wanita	23	30 Menit	01/03/2025
4.	PO29	Ketua Ikatan Pemuda Pemudi Dondong (IPPD)	Pria	29	60 Menit	02/10/2024

5.	WN51	Kepala Dukuh Dondong	Pria	51	55 Menit	17/08/2024
6.	HO41	Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Padukuhan (LPPM) Dondong	Pria	41	61 Menit	02/11/2024
7.	AP55	Akademisi	Pria	55	34 Menit	17/08/2024
8.	HS63	Kaum Dondong	Pria	53	46 Menit	01/09/2024
9.	DS40	Masyarakat Dondong	Wanita	40	25 Menit	01/03/2025

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Padukuhan Dondong, Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari yang melakukan revitalisasi Telaga Dondong. Lokasi ini dipilih dari pada beberapa daerah lain di Gunungkidul berdasarkan beberapa pertimbangan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, tipologi pemanfaatan lingkungan. Sebagai daerah kering daratan Karst, masyarakat di Kabupaten Gunungkidul bergantung pada akses dan ketersediaan terhadap air untuk menopang kehidupan sehari-hari dan mata pencahariannya. Masyarakat di Gunungkidul secara umum menggunakan air untuk keperluan kehidupan seperti mandi, cuci, dan kakus sedangkan secara khusus untuk keperluan mata pencahariannya seperti peternakan dan perikanan serta pertanian. Berkaitan dengan fungsi tersebut, revitalisasi Telaga Dondong dipilih sebab fungsi khususnya adalah untuk peternakan dan perikanan masyarakat (Gunungkidul 2007), artinya pemilihan telaga ini didasarkan pada salah satu fungsi utama pemanfaatan lingkungan khususnya telaga oleh masyarakat.

Kedua, masyarakat di kalurahan tersebut memiliki sejarah yang panjang terkait hubungan manusia dengan pemanfaatan lingkungan selain dari mata pencaharian yakni aspek sosio-kultural. Berdasarkan data yang diperoleh dari *pre-eliminary research* atau penelitian pendahuluan, masyarakat lokal tidak sebatas memahami lingkungan khususnya telaga, *mbelik*,

atau sendang sebagai sumber air, namun juga sebagai pusat kegiatan sosial-kultural masyarakat. Sumber-sumber air tersebut yang saat ini kering dahulu sering digunakan sebagai wadah pertemuan masyarakat lokal untuk sekedar silaturahmi antar sesama tanpa memandang kelas sosial tertentu, bahkan sebagai tempat pelaksanaan ritual kebudayaan atau keagamaan tertentu. Dahulu mereka memiliki kearifan lokal untuk menjaga telaga dari kerusakan, namun saat ini kearifan lokal tersebut tidak cukup mampu untuk mengembalikan kondisi telaga menjadi terus terisi bahkan saat musim kemarau.

Ketiga, masyarakat dari daerah tersebut adalah masyarakat yang telah memulai gerakan konservasi lingkungan ketika menjelang musim hujan tiba. Bulan Agustus dan September 2024 adalah beberapa waktu sebelum datangnya musim hujan di akhir September atau awal Oktober. Berkaitan dengan linimasa musim tersebut, masyarakat di padukuhan tersebut adalah masyarakat yang terakhir melakukan upaya konservasi lingkungan. Pemilihan lokasi tersebut merupakan keberuntungan bagi peneliti supaya dapat mengamati secara langsung bagaimana dampak jangka pendek dari upaya konservasi yang telah dilakukan.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diinterpretasi melalui tahapan analisis data. Proses dalam tahapan ini penting untuk dilakukan agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari data penelitian yang banyak dan tidak tersusun secara tertib. Pada proses analisis data, beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; *pertama*, reduksi data. Data yang telah terkumpul dari proses pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi pertama-tama diseleksi melalui pemisahan data yang relevan dan yang tidak relevan dengan topik penelitian. Setelah melakukan proses seleksi, peneliti akan lebih mudah untuk menentukan sejumlah data yang mengandung pernyataan-pernyataan strategis untuk membangun argumentasi berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap reduksi data, peneliti sekaligus akan mengidentifikasi data-data mana saja yang sudah utuh dan data-data

mana saja yang masih mentah sehingga membutuhkan pengumpulan data kembali untuk menguatkan data tersebut. Sebelum semua data dipastikan telah dapat memberikan pemahaman yang kompleks, proses analisis tidak bisa dilanjutkan sebab akan berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu *data display* atau penyajian data.

Kedua, data display atau penyajian data. Meskipun data hasil penelitian telah diseleksi secara kritis, data tetap perlu disajikan dengan runtut dan rapi agar memudahkan peneliti untuk menganalisis data secara keseluruhan. Melalui penyajian data, peneliti akan melihat keseluruhan data secara utuh meliputi data primer maupun sekunder, lalu melakukan klasifikasi dan sistematisasi sehingga dapat memetakan relevansi atau keterhubungan satu data dengan data yang lain. Di samping itu, *data display* akan memudahkan peneliti untuk memunculkan konteks atau isu strategis yang telah dihasilkan sebelumnya dari proses pengumpulan data.

Ketiga, menafsirkan atau menginterpretasi keseluruhan data melalui data yang telah disajikan. Setelah proses penyajian data, peneliti akan memunculkan pemahamannya secara subjektif dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah secara mendalam. Tahap ini penting untuk dilakukan guna memudahkan peneliti untuk selanjutnya menarik kesimpulan penelitian. *Keempat*, mengecek atau memverifikasi kembali data secara keseluruhan dan diakhiri penarikan kesimpulan. Langkah terakhir berupa pengecekan atau verifikasi data dilakukan peneliti untuk berkomitmen secara akademis bahwa interpretasi dan pemahaman yang dihasilkan berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi data tersebut penting sehingga proses terakhir yaitu penarikan kesimpulan dapat merefleksikan substansi fundamental dari rangkaian proses dan hasil penelitian yang kompleks dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian dalam penelitian ini akan terdiri dari lima bab, dengan sistematika ialah sebagai berikut, Bab I yakni Pendahuluan akan mendeskripsikan latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab II akan mendeskripsikan masyarakat lokal, lingkungan, dan Komunitas Resan. Pada bagian ini, pada bagian ini akan dijelaskan kondisi masyarakat lokal dan lingkungan yang mencakup aspek sosial, budaya, dan kondisi lingkungan hidup masyarakat lokal. Selain itu, penulis akan mengurai sejarah terbentuknya komunitas, hal-hal yang mendasari terbentuknya komunitas, prinsip komunitas, dan keterangan yang memuat operasional komunitas. Bab III akan mendeskripsikan bagaimana strategi konservasi lingkungan dalam pengembangan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Bab IV akan mendeskripsikan tipe etika lingkungan yang diterapkan pada konservasi lingkungan berbasis komunitas di Kabupaten Gunungkidul. Bab V akan berisi penutup/kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

Masyarakat Gunungkidul, khususnya di Padukuhan Dondong, merupakan mahluk sosial dan mahluk ekologi. Manusia yang hidup di Dondong mengalami proses perkembangan dan peradaban yang panjang sebelum bermetamorfosis menjadi pribadi yang utuh, melalui sarana interaksi dengan komunitas sosial dan komunitas ekologis. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan sosial dan pemahaman ekologis masyarakat menurun akibat adanya perubahan baik secara sosial maupun secara ekologis. Perubahan iklim dan pembangunan telaga telah merusak ekosistem Telaga Dondong sehingga selalu kering setiap musim kemarau panjang, sementara itu masyarakat masih sangat bergantung pada sumber daya yang ada pada telaga untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun pada dasarnya masyarakat Padukuhan Dondong telah memiliki sejumlah kearifan lokal yang mengatur tentang pengelolaan dan perawatan telaga, namun akibat degradasi interpretasi makna terhadap budaya dan kearifan lokal serta hilangnya manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem telaga, upaya konservasi lingkungan melalui revitalisasi telaga tidak kunjung terrealisasikan sehingga menjadi salah satu penyebab kemiskinan masyarakat.

Komunitas Resan sebagai wadah perkumpulan masyarakat di Gunungkidul yang memiliki kepedulian terhadap ekosistem telaga dan kesejahteraan masyarakat lokal selanjutnya memberikan dampingan berupa fasilitasi terhadap masyarakat di Padukuhan Dondong dalam agenda konservasi lingkungan pada revitalisasi Telaga Dondong berbasis masyarakat atau kearifan lokal. Gagasan strategi Komunitas Resan dalam konservasi lingkungan berbasis masyarakat terbentuk melalui integrasi dan penyorotan secara tradisional terhadap masyarakat dan kearifan lokalnya yang telah tumbuh di Padukuhan Dondong. Beberapa strategi yang dilaksanakan adalah upaya penyadaran, pengkapisitasan, dan pendayaan masyarakat Padukuhan Dondong berbasis kearifan lokal. Penyadaran dilakukan untuk merekonstruksi -

posisi masyarakat dalam pembangunan dari objek menuju subjek pembangunan. Pengkapasitasan dilakukan sebagai sarana edukasi masyarakat berbasis *wedangan* yang cair dan santai tentang upaya konservasi lingkungan. Sementara itu pendayaan dilakukan dengan memberikan otoritas sebesar-besarnya terhadap masyarakat di Padukuhan Dondong khususnya Ikatan Pemuda Pemudi Dondong (IPPD) dalam kewenangan pengelolaan dan *local heroes* revitalisasi telaga. Di samping itu, pendayaan juga dilakukan dengan memperluas jaringan dan bantuan untuk mensukseskan upaya konservasi lingkungan berbasis masyarakat di Padukuhan Dondong.

Berdasarkan hasil analisis terhadap etika lingkungan yang diterapkan pada konservasi lingkungan berbasis masyarakat di Padukuhan Dondong, dapat diketahui bahwa penanganan problem ekologis memerlukan dorongan dari ranah teknis pengembangan masyarakat atau *action plan community based conservation* namun tetap melalui ekstensi moralitas masyarakat yang hidup dan tinggal bersama lingkungan. Moralitas masyarakat di Padukuhan Dondong merupakan aset sosial yang sangat penting sebagai modal dalam upaya konservasi lingkungan. Pada prosesnya, upaya konservasi ini menunjukkan adanya perpaduan pendekatan yang dilakukan oleh Komunitas Resan. Keduanya adalah pendekatan ekosentris dan pendekatan *human ecology welfare*. Pendekatan ekosentris digunakan sebagai motor penggerak masyarakat sebagai entitas yang telah memiliki sejarah panjang dengan lingkungan, sementara pendekatan *human ecology welfare* digunakan sebagai orientasi atau tujuan utama program konservasi lingkungan atau revitalisasi Telaga Dondong dilaksanakan. Dengan mengandalkan kedua pendekatan tersebut, diharapkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan dapat berlangsung secara terus menerus atau bersifat *sustainable*.

Hasil penelitian strategi komunitas resan dalam konservasi lingkungan berbasis komunitas ini paling tidak memiliki tiga batasan. Pertama, durasi penelitian yang terbilang cukup singkat. Upaya konservasi lingkungan di ranah lokal yang dilakukan hanya dengan

mengoptimalkan teknologi masyarakat yakni kearifan lokal, merupakan sebuah *ikhtiar* konsisten yang membutuhkan waktu cukup lama. Keterbatasan durasi penelitian membuat peneliti tidak mampu memberikan dampak empiris hasil konservasi yang telah dilakukan. Adapun hasil sementara yang dapat dikumpulkan adalah bentuk kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri. Sementara itu, dampak perubahan nyata pada ekosistem Telaga Dondong yang direvitalisasi masih belum dapat dipastikan. Kedua, penelitian ini belum dapat menyajikan identifikasi secara lebih komprehensif terhadap kearifan lokal dalam bentuk budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dan kaitannya terhadap lingkungan. Ketiga, dimensi penelitian ini belum dapat menjangkau strategi komunitas dalam konservasi lingkungan pada tataran makro sebagai perumus kebijakan dan program daerah yang bersifat lebih inklusif dan kompleks. Maka berdasarkan beberapa keterbatasan tersebut, peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang dapat memperkaya gagasan pada ketiga aspek tersebut. Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai upaya memperluas khazanah pengetahuan khususnya pada disiplin konservasi lingkungan berbasis masyarakat dan pengembangan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Rijal. 2017. "Analisis Teori Dehumanisasi Pendidikan Paulo Freire." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 2 (1): 1–21. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/4247>.
- Agus Maryono dan Edy Nugroho Santoso. 2006. *Metode Memanen Dan Memanfaatkan Air Hujan Untuk Penyediaan Air Bersih, Mencegah Banjir Dan Kekeringan*. 1st ed. Jakarta: Asdep Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam & Pengendalian Kerusakan Lingkungan, KLH. <https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/metode-memanen-dan-memanfaatkan-air-hujan-untuk-penyediaan-air-bersih-mencegah-banjir-dan-kekeringan/1028>.
- Ahmed, Tallal, Waqas Khalid, and Adeela Aslam. 2022. "Energy Conservation Potential in Highway Illumination System: A Techno-Enviro-Economic Study on Retrofitting HPS with LED Luminaires." *Energy and Environment* 33 (3): 599–613. <https://doi.org/10.1177/0958305X211020477>.
- Alberts, R. C., M. Hauptfleisch, F. P. Retief, C. Roos, D. P. Cilliers, J. Atuyima, H. J. Moolman, L. Liebenberg, G. K. Haingura, and A. J. Bond. 2024. "Developing a Deliberative-Delphi Method for Informing National Conservation Capacity Development Strategies." *Journal of Environment and Development*. <https://doi.org/10.1177/10704965241271266>.
- Al-Manshur, Djunaidi Ghani dan Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Amartya Sen. 1999. *Develeopment as Freedom*. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf, inc.
- Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain, and Muslim Azis. 2024. "Failure of Sustainable Waste Management In The Perspective of Community Empowerment in the Garbage Canister Program in Dusun Karang." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat* 22 (1): 11–24. <https://alhikmah.uinkhas.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/199>.
- Andi May. 2025. "Ngedreg, Cara Warga Jetis, Saptosari, Ngabuburit Dengan Berburu Ikan Di Telaga Dondong." *Radar Jogja*, 2025. <https://radarjogja.jawapos.com/seni-budaya/655725890/ngedreg-cara-warga-jetis-saptosari-ngabuburit-dengan-berburu-ikan-di-telaga-dondong>.
- Antara, I Gede Made Yudi. 2021. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)* 4 (2): 112–21. <https://doi.org/10.33173/jsikti.144>.
- Apriyani, Santi, Gregorius Sri, Wuryanto Prasetyo, and Henry Feriadi. 2022. "Adaptasi Masyarakat Desa Tileng Girisubo Dalam Menghadapi Kekeringan." *Seminar on Architecture Research and Technology (SMART)* #6 2022 (6): 119–26.

- Arif, Arifuddin M. 2020. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1 (2): 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28>.
- Assalimi, Faiz Arwi, and Pandhu Yuanjaya. 2023. "Collective Action Komunitas Resan Gunungkidul Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kabupaten Gunungkidul." *Journal of Public Policy and Administration Research* 08 (6): 1–11.
- Baedhowi. 2008. "Kearifan Lokal Kosmologi Kejawaen Studi Pos-Kolonial Pandangan Kosmologi Romo Yoso Dan Implikasinya Bagi Warga Tutup Ngisor - Magelang." In *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, edited by M. Iqbal Ahnaf Irwan Abdullah, Ibnu Mujib, 2nd ed., 15–48. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Bergh, Michiel O.L. van den. 2015. "The Role of Community Organisations in Integrated Conservation and Development Projects: Local Perspectives from the Sahel Region." *Biodiversity* 15 (2–3): 88–100. <https://doi.org/10.1080/14888386.2014.933129>.
- Berkes, Fikret. 2007. "Community-Based Conservation in a Globalized World." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104 (39): 15188–93. <https://doi.org/10.1073/pnas.0702098104>.
- Borrong, Robert P. 1999. *Etika Bumi Baru*. 1st ed. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Cagalan, Dominique. 2018. "Integrated Conservation and Development: Impacts on Households in a Philippine Park." *Journal of Environment and Development* 22 (4): 435–58. <https://doi.org/10.1177/1070496513504930>.
- Carm, P. Go. O. 1989. *Etika Lingkungan Hidup*. 1st ed. Malang: Dioma.
- Case, Peter, Louisa S. Evans, Michael Fabinyi, Philippa J. Cohen, Christina C. Hicks, Murray Prideaux, and David J. Mills. 2015. "Rethinking Environmental Leadership: The Social Construction of Leaders and Leadership in Discourses of Ecological Crisis, Development, and Conservation." *Leadership* 11 (4): 396–423. <https://doi.org/10.1177/1742715015577887>.
- Chaiphar, Weerakul, Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn, and Aree Naipinit. 2013. "Local Wisdom in the Environmental Management of a Community: Analysis of Local Knowledge in Tha Pong Village, Thailand." *Journal of Sustainable Development* 6 (8): 16–25. <https://doi.org/10.5539/jsd.v6n8p16>.
- Chambers, Josephine, Margarita Del Aguila Mejía, Raydith Ramírez Reátegui, and Chris Sandbrook. 2020. "Why Joint Conservation and Development Projects Often Fail: An in-Depth Examination in the Peruvian Amazon." *Environment and Planning E: Nature and Space* 3 (2): 365–98. <https://doi.org/10.1177/2514848619873910>.
- Chambers, Robert. 1995. *Participatory Rural Appraisal: Methods and Applications in Rural Planning*. *Participatory Rural Appraisal: Methods and Applications in Rural Planning*.
- Gidebo, Henok Bekele. 2023. "Linking Livelihood and Biodiversity Conservation in Protected Areas: Community Based Tourism Development Perspective from Developing Country."

- Tourism and Hospitality Research* 23 (3): 361–75.
<https://doi.org/10.1177/14673584221102699>.
- Gunungkidul, BPS. 2024. *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024*. 46th ed. Kabupaten Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Gunungkidul, Pemkab. 2007. “Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007.” *Pemkab Gunungkidul*. Kabupaten Gunungkidul.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Gupta, Priya. 2021. “Bridges and Borders: Entanglements of Conservation—Conservation Is Development in the Forests of Nagarhole Tiger Reserve, India.” *Journal of South Asian Development* 16 (1): 54–74. <https://doi.org/10.1177/09731741211005630>.
- Hanifah, Umi. 2019. “Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim).” *Jurnal Sosiologi Agama* 13 (1): 41. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-02>.
- Hasanah, Hasyim. 2017. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8 (1): 21.
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hatma Indra Jaya, Pajar, Ahmad Izudin, and Rahadiyand Aditya. 2022. “The Role of Ecotourism in Developing Local Communities in Indonesia.” *Journal of Ecotourism*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/14724049.2022.2117368>.
- Hatma, Pajar, and Indra Jaya. 2012. “Dinamika Pola Pikir Orang Jawa.” *Humaniora*, Vol. 24, No. 2 Juni 2012: 133–140 24 (2): 133–40. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/1056/885>.
- Herrold-Menzies, Melinda. 2006. “Integrating Conservation and Development: What We Can Learn from Caohai, China.” *Journal of Environment and Development* 15 (4): 382–406.
<https://doi.org/10.1177/1070496506294491>.
- Hin, • Alvin Lim Cheng. 2002. “Martin Buber’s Philosophy of Dialogue as a Foundation for Environmental Ethics.” Honours Thesis, National University of Singapore.
- HM, Pahrudin. 2011. “Urgensi Revitalisasi Kearifan Lokal di Tengah Ancaman Bencana Alam Indonesia.” *Unisia* 33 (75): 250–57. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art4>.
- Ibrohim Saputra, Fembriarti Erry Prasmatiwi, Zainal Abidin, Agus Setiawan. 2023. “Persepsi Petani Padi Sawah Irigasi Dan Tadah Hujan Terhadap Perubahan Iklim Di Kabupaten Lampung Selatan.” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)* 7 (1): 166–75.
- Iskandar, Johan. 1992. *Ekologi Perladangan Indonesia: Studi Kasus Dari Daerah Baduy Banten Selatan*. Jakarta: Penerbit Djembatan.
- Keraf, Alexander Sonny. 2005. *Etika Lingkungan*. 1st ed. Jakarta: Kompas.

- Khairina, Etika, Eko Priyo Purnomo, and Ajree D Malawnai. 2020. "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ketahanan Nasional* 26 (2): 155. <https://doi.org/10.22146/jkn.52969>.
- Lubis, Zulkifli B. 2005. "Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Tapanuli Selatan." *Jurnal Antropologi Indonesia* 29 (3).
- Magdalena, Ulises Rodrigo, Gabriel Barros Gonçalves de Souza, and Raul Reis Amorim. 2023. "Spatial Analysis Guiding Decision Making in Environmental Conservation: Systematic Conservation Planning and Ecosystem Services." *Progress in Physical Geography* 47 (1): 123–39. <https://doi.org/10.1177/03091333221112409>.
- Marfai, Muh Aris. 2005. *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*. 1st ed. Yogyakarta: Kreasi Wacana dan Wahana Hijau.
- . 2013. *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. 2nd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Source Book*. Third. California: Sage Publication.
- Medeiros, Almerinda M., Lorena S.R. de Araújo, Samuel L. Mesquita, Natália R.C. Aragão, Carlos A.L. Rodrigues, Elba P. Chaves, Raimunda N.F. Carvalho-Neta, and Alana L. de Sousa. 2023. "Traditional Knowledge on the Use of Turtles in a Protected Area of the Amazon in Maranhão (Brazil): A Conservation Proposal." *Journal of Ethnobiology* 43 (2): 165–75. <https://doi.org/10.1177/02780771231176468>.
- Meyer, Maximilian, and Jan Börner. 2022. "Rural Livelihoods, Community-Based Conservation, and Human–Wildlife Conflict: Scope for Synergies?" *Biological Conservation* 272 (February). <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109666>.
- Mitchel, Bruce. 2003. *Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan*. Edited by Gadjah Mada University Press. 1st ed. Yogyakarta.
- Mufune, Pempelani. 2015. "Community Based Natural Resource Management (CBNRM) and Sustainable Development in Namibia." *Journal of Land and Rural Studies* 3 (1): 121–38. <https://doi.org/10.1177/2321024914534042>.
- MURRAY, TANIA LI. 2021. "The Will to Improve." *The Will to Improve*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smt9s>.
- Muslim, Azis. 2016. "Economic Community Empowerment Through Tourist Village Development." *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 32 (2): 343. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1839>.
- Mu'tasim, Radjasa. 1994. "Pendidikan Etika Lingkungan Hidup Orientasi Ke Arah Pendidikan Yang Holistik." *Al-Jami'ah Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam* 54 (4): 36–46.
- Niswi, Azra, Nur Annisa Putri, Rini Novika, and Rini Wahyu Siregar. 2024. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Dinamika Sosial Dan Agama." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2 (11): 71–80.

- Nugroho, Juliadi, Muhammad Zid, and Mieke Miarsyah. 2020. "Potensi Sumber Air Dan Kearifan Masyarakat Dalam Menghadapi Risiko Kekeringan Di Wilayah Karst (Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta)." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)* 4 (1): 438–47. <https://doi.org/10.36813/jplb.4.1.438-447>.
- Nusyirwan, Iwan. 1995. "Etika Lingkungan Bagi Kesejahteraan Masyarakat." *Filsafat* 23 (5): 36–43.
- Pertana, Pradito Rida. 2023. "344 Telaga Di Gunungkidul Meringing Akibat Musim Kemarau." Detiknews. 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6908867/344-telaga-di-gunungkidul-kering-gegara-musim-kemarau>.
- Petatematikindo. 2013. "Administrasi Kabupaten Gunungkidul," June 22, 2013. <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/06/22/administrasi-kabupaten-gunungkidul/>.
- Pratiwi, Santi, and Nataly Juerges. 2022. "Advocacy Coalitions and Knowledge Transfer within Geothermal Policy Change in Indonesian Conservation Forests." *Journal of Environment and Development* 31 (2): 168–95. <https://doi.org/10.1177/10704965211070244>.
- Putri, Lesi Oktiani, Anggraeni Dewi, Dan Rizky, and Saeful Hayat. 2023. "Dampak Modernisasi Terhadap Minimnya Kesadaran Berbudaya." *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN* 2 (1): 101–12.
- Reisland, Melissa Ann. 2013. "Conservation in Sacred Forest: An Integrated Approach to Assessing The Management of a Community Based Conservation Site." *Madison Proquest Dissertation and Thesis*.
- RI, BPK. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Society. Jakarta.
- RI, Kemen LHK. 2024. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutana Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*. Jakarta.
- Risti Aulia, Dea, Herjuno Putro, and Laras Dwi Mufidah. 2023. "Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3:2299–3010.
- Rochmayanto, Yanto. 2014. "Pengaruh-Utamaan Biaya Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Dengan Perencanaan Pembangunan." *Policy Brief*. Vol. 8. [https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perubahan-iklim-climate-change-32#:~:text=IPCC \(2001\) menyatakan bahwa perubahan,\(biasanya dekade atau lebih\)](https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perubahan-iklim-climate-change-32#:~:text=IPCC (2001) menyatakan bahwa perubahan,(biasanya dekade atau lebih).).
- Rozaki, Abdur. 2016. *Islam, Oligarki Politik, Dan Perlawanan Sosial*. 1st ed. Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan SUKA PRESS.
- Safitri, Edi. 2020. "Large Tradition in Building Tolerance: A Study in Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mubarak, Sleman Yogyakarta in Developing Inter-Religious Harmony."

- Millah: Journal of Religious Studies* 19 (2): 345–71.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art7>.
- Schmidt-Soltan, Kai. 2015. “The Costs of Rainforest Conservation: Local Responses towards Integrated Conservation and Development Projects in Cameroon.” *Journal of Contemporary African Studies* 22 (1): 93–117.
<https://doi.org/10.1080/0258900042000179625>.
- Setiawati, Kris Mheilda. 2023. “Tradisi Wedangan, Sebuah Strategi Komunikasi Di Gunungkidul.” Rebowagen.Com. 2023.
- Shagir, Kamajaya dan Taufiq Ismail. 2017. “The Spectacular Tower Karst.” KSDAE. 2017.
<https://ksdae.menlhk.go.id/info/1104/The-Spectacular-Tower-Karst.html>.
- Sharma, Ravi. 2023. “Civil Society Organizations’ Institutional Climate Capacity for Community-Based Conservation Projects: Characteristics, Factors, and Issues.” *Current Research in Environmental Sustainability* 5 (April): 100218.
<https://doi.org/10.1016/j.crsust.2023.100218>.
- SID. 2024. “Tabel Data Kependudukan Berdasar Populasi per Wilayah.” 2024.
<https://desajetis.gunungkidulkab.go.id/first/wilayah>.
- Silwal, Thakur, Bishnu P. Devkota, Prabin Poudel, and Mark Morgan. 2022. “Do Buffer Zone Programs Improve Local Livelihoods and Support Biodiversity Conservation? The Case of Sagarmatha National Park, Nepal.” *Tropical Conservation Science* 15:1–11.
<https://doi.org/10.1177/19400829221106670>.
- Sloan, Sean, Mohammed Alamgir, Mason J. Campbell, Titiek Setyawati, and William F. Laurance. 2019. “Development Corridors and Remnant-Forest Conservation in Sumatra, Indonesia.” *Tropical Conservation Science* 12.
<https://doi.org/10.1177/1940082919889509>.
- Soetarno. 2004. *Wawasan Budaya Untuk Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM.
- Sriharini, Sriharini, and Shofwah Syafira. 2020. “Protecting Traditions with Modernization: Community Empowerment in Rejowinangun through the Village of Traditional Herbal Medicine Destination.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 4 (2): 463–84. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.042-09>.
- Sriharini, Sriharini, Siti Syamsiyatun, Agus Suprianto, and Sumarni. 2024. “Community-Based Support System in Suicide Prevention: Experiences from Indonesian Grassroots.” *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13 (1): 47–62.
<https://doi.org/10.14421/welfare.2024.131-03>.
- Sudarmaji, Slamet Suprayogi, M. Widyastuti, Rika Harini. 2011. “Konservasi Mata Air Berbasis Masyarakat Di Unit Fisiografi Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari Dan Perbukitan Karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunungkidul.” *Teknosains* 1 (1): 42–53.
- Sulastriyono, Mr. 2012. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang Dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta.” *Mimbar*

- Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21 (2): 243.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16267>.
- Sullivan, Theresa K., and Amy K. Syvertsen. 2019. "Conservation Leadership: A Developmental Model." *Journal of Adolescent Research* 34 (2): 140–66.
<https://doi.org/10.1177/0743558417752638>.
- Supriatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafat Tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Tafon, Ralph, and Fred P. Saunders. 2015. "Power Relations and Cassava: Conservation and Development in Cameroon." *Journal of Environment and Development* 24 (1): 82–104.
<https://doi.org/10.1177/1070496514551985>.
- Teampanpong, Jiraporn, Nureehuan Da-ouli, Preeda Thiensongrusamee, Noppawan Tanakanjana Phongkiao, and Pilai Poonswad. 2024. "Social Determinants of Success of Community-Based Hornbill Conservation in Thailand." *Global Ecology and Conservation* 51 (July 2023): e02883. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e02883>.
- Teller, Amy S. 2016. "Moving the Conversation on Climate Change and Inequality to the Local." *Sociology of Development* 2 (1): 25–50. <https://doi.org/10.1525/sod.2016.2.1.25>.
- Thoha, HM. Nasruddin Anshoriy Ch dan Zainal Arifin. 2005. *Berguru Pada Jogja*. Edited by Soemadi M. Wonotiho dan Marzuki Usman. 1st ed. Yogyakarta: Kutub Yogyakarta.
- Wahyuni, Dinar. 2018. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9 (1): 85–102.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i1.994>.
- Wibowo, Kismaya. 2023. "Telaga Dondong Kering, Warga 2 Padukuhan Gunungkidul Terpaksa Beli Air Bersih." *INews Yogya*. 2023. https://yogya.inews.id/berita/telaga-dondong-kering-warga-2-padukuhan-di-gunungkidul-terpaksa-beli-air-bersih#google_vignette.
- Yogi, IBPP. 2020. "Pelestarian Gua-Gua Prasejarah Di Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal)." *Forum Arkeologi*. <http://forumarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/fa/article/view/597>.